

**FUNGSI KORDINASI DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DATI II  
BARRU**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk  
menempuh ujian sarjana ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas "45"  
Ujung Pandang

**1990**

## A B S T R A K S I

Kordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses administrasi termasuk proses perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan organisasi yang pada hakekatnya merupakan organisasi perencanaan pembangunan di Daerah secara komprehensif. Dengan demikian organisasi ini mempunyai hubungan yang erat dengan organisasi lain di Daerah tersebut. Sehingga kordinasi mutlak di perlukan pada tiap-tiap organisasi. BAPPEDA sebagai unsur perencana secara komprehensif dengan skala penentuan prioritas, dengan demikian Instansi Vertikal dan Dinas Daerah serta Badan-badan Lain yang ada dalam Wilayah Daerah tersebut disinkronisasikan berbagai masalah untuk mencapai tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran tentang pelaksanaan kordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kordinasi perencanaan pembangunan di Daerah tersebut.

Sebagai hasil penelitian yang penulis lakukan di-BAPPEDA Tingkat II Barru yang termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1987 yang kemudian dituangkan kedalam Peraturan Daerah Tingkat II Barru nomor 04 Tahun 1982, yaitu dengan melakukan kordinasi diantara Dinas-Dinas Daerah Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan serta Badan - Badan lainnya dalam Wilayah Daerah Tingkat II. Namun demikian da-

lam melakukan fungsi tersebut masih ditemukan beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan kordinasi pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut adalah terbatasnya tenaga/personil Bappeda Tingkat II Barru dalam mengelolah/menyusun perencanaan pembangunan di Daerah itu sendiri yang ber kemampuan yang tinggi atau tenaga ahli dalam mengembang tugas sebagai tenaga perencanaan pembangunan, yaitu keterbatasan berupa tenaga, waktu dan biaya dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara kontinue pada lokasi proyek pembangunan dan kurangnya tenaga dalam menyusun laporan pelaksanaan program/proyek pembangunan serta penempatan personil yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : FUNGSI KORDINASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU.

Nama Mahasiswa : R e n i i.

Nomor Stb/NIRM : 4586020393/871133420.

Menyetujui

Pembimbing I

(Drs. H. Tayeb Tamma)

Pembimbing II

(Drs. H. P.S. Rahim)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 ".

Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

(Drs. H. Mohammad Thala)

(Drs. H. Sadly AD, MPA)

Tanggal Pengesahan : .....



HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Minggu, 27 Januari 1991

Skripsi atas nama : R a m l i

Nomor Stambuk/NIRM : 4586020393/871133420

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 " Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Administrasi Negara.

PENGAWAS UMUM

(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid) (Drs. H. Sadly AD, MPA)  
Rektor Universitas "45" Dekan FISIPOL Unhas

PANITIA UJIAN SKRIPSI

(Drs. H. Mohammad Thala) (Drs. Guatur Karnadi)  
Ketua Sekretaris

(Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah)

Anggota

T I M P E N G U J I

1. Drs. H. Sadly AD, MPA
2. Dr. H. A. Anwar Arifin
3. Drs. A. Rachman Kotta, SU
4. Drs. H. P.S. Rahim

(.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, atas limpahan dan rahmat taufiknyalah sehingga karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, namun dengan demikian penulis menyadari sedalamnya, bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan yang tentunya banyak menimbulkan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi pembahasannya. Olehnya itu dalam mendekati kesempurnaan skripsi ini mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun.

Adapun penulis skripsi ini untuk mengetahui fungsi kordinasi perencanaan pembangunan yang berlangsung dalam suatu organisasi, utamanya pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru, disamping itu juga ditelaah tentang faktor - faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi kordinasi tersebut.

Atas selesainya skripsi ini maka penulis banyak berutang budi kepada beberapa pihak, olehnya itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhammad Thala selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

2. Bapak Drs. H. Sadly AD, MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. M. Tayeb Tamma selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H.P.S. Rahim selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan ini.
4. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang penuh kesetiaan yang telah mengajar dan membimbing serta membekali ilmu selama mengikuti kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
5. Bapak Drs. A. Maryamin, MS selaku Ketua Bappeda Tingkat II Barru beserta stafnya yang telah memberikan data dan keterangan-keterangan selama penulis mengadakan penelitian.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, memberikan pengorbanannya sejak masih kecil sampai sekarang dan senantiasa mencurahkan perhatiannya serta doa selalu mengiringi anakda dalam mencapai cita-citanya.
7. Kakanda Abdul Hakim, Suwati, La Bennu, Muhammad Sani & Hawania yang telah banyak memberikan dorongan baik moral maupun materil, sehingga penyelesaian thesis ini dapat terwujud.

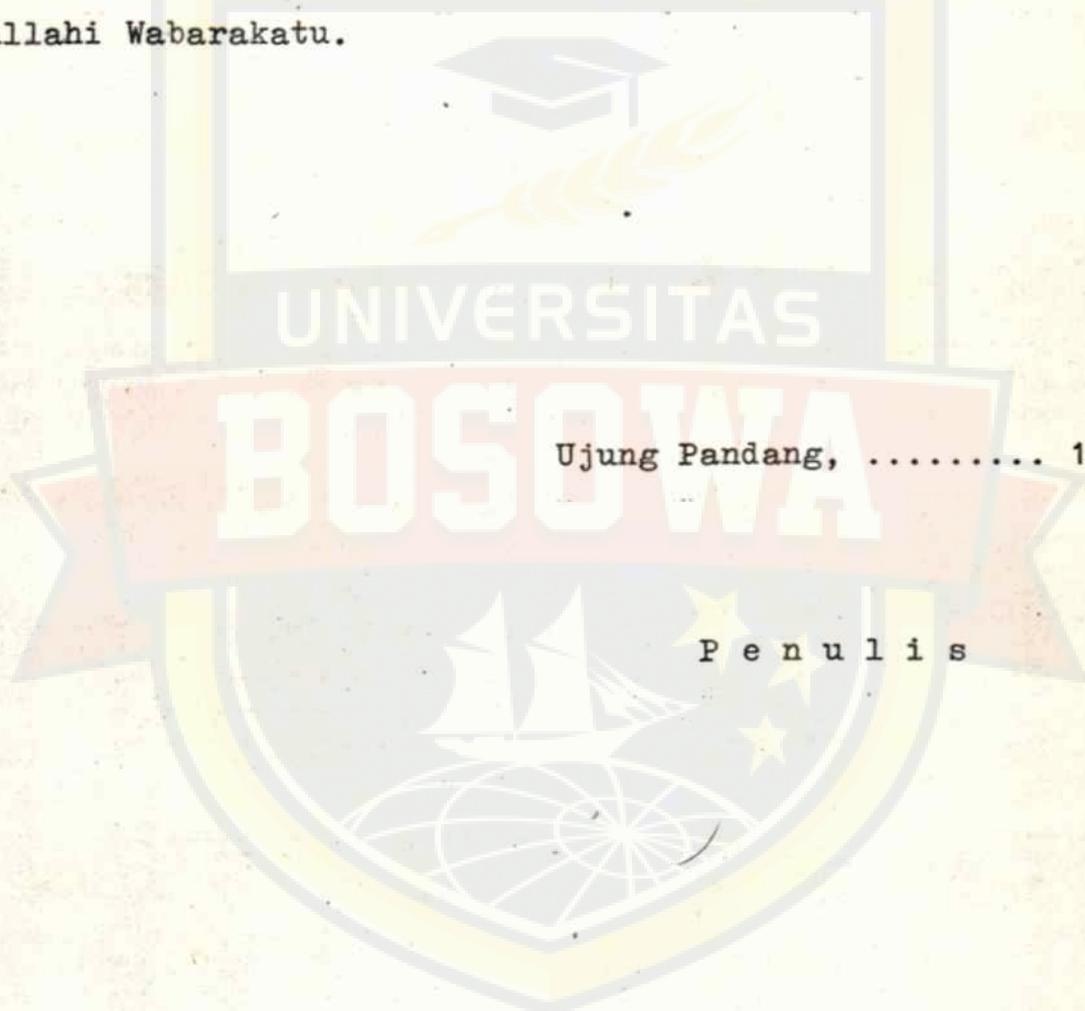
Akhirnya dengan doa yang tulus dari penulis semoga bantuan yang diberikan kepada penulis kiranya mendapat pa-

hala dari Allah Subehana Wataala.

Semoga skripsi ini dapat bermamfaat, baik bagi pribadi penulis maupun kepada seluruh pembaca yang budiman.

A m i n.

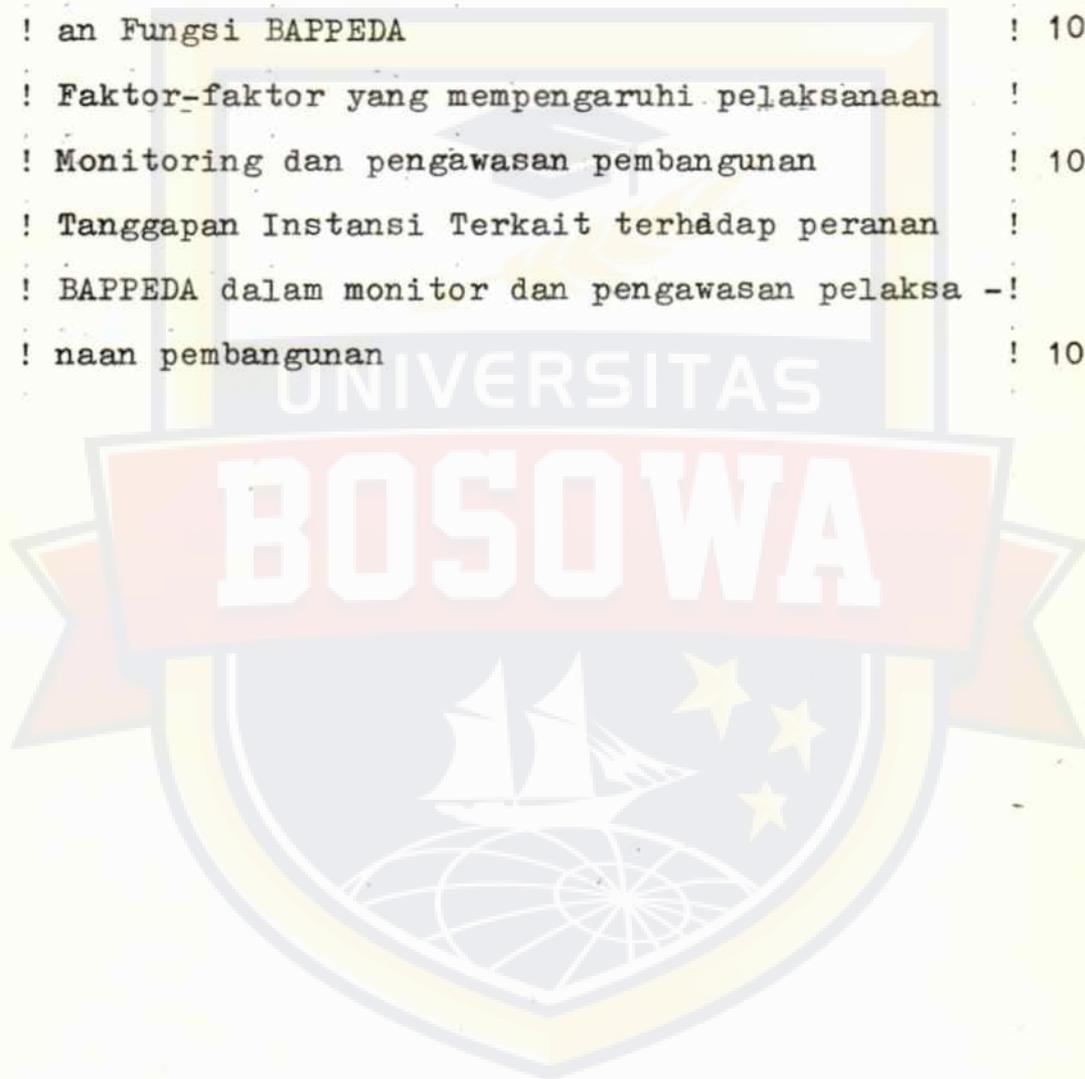
Wabillahi Taufiq Walhidaya, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.



DAFTAR TABEL

NO. !	J U D U L	! halaman
1. !	2	! 3 !
1. !	Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Barru diperin- ! ci menurut Kecamatan 1989	! 37 !
2. !	Distribusi Penduduk menurut Umur dan jenis ke- ! lamin di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru	! 38 !
3. !	Laju Perkembangan Penduduk selama 5 tahun di- ! Kabupaten Daerah Tingkat II Barru	! 39 !
4 !	Komposisi Penyebaran Penduduk di Kabupaten ! Dati II Barru 1989	! 39 !
5. !	Keadaan Pegawai Badan Perencanaan Pembanguana ! Daerah Tingkat II Barru	! 54 !
6. !	Keadaan Pendidikan Pegawai Bappeda Tingkat II ! Barru	! 55 !
7. !	Tanggapan Responden terhadap pimpinan BAPPEDA ! Tingkat II Barru	! 85 !
8. !	Keterlibatan responden dalam menunjang peren- ! canaan Pembangunan di Kabupaten Dati II Barru	! 89 !
9. !	Personil BAPPEDA diperinci menurut tingkat ! Pendidikan ( Sarjana )	! 92 !
10. !	Personil BAPPEDA diperinci menurut tingkat ! Pendidikan ( Sarjana Muda )	! 93 !
11. !	Personil BAPPEDA diperinci menurut tingkat ! Pendidikannya ( SLA/SD )	! 94 !
12. !	Tanggapan Personil tentang keadaan sarana	! !

1.	2	3
!	dalam menunjang fungsi BAPPEDA	! 97 !
13.	Tanggapan Instansi Terkait terhadap pelaksana- ! an Fungsi BAPPEDA	! 100 !
14.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ! Monitoring dan pengawasan pembangunan	! 103 !
15.	Tanggapan Instansi Terkait terhadap peranan ! BAPPEDA dalam monitor dan pengawasan pelaksa - ! naan pembangunan	! 104 !



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENERIMAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metodologi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KORDINASI.....</b>	<b>14</b>
A. Beberapa pengertian tentang.....	14
1. <b>Kordinasi</b> .....	14
2. Perencanaan.....	17
3. Pembangunan.....	21
B. Pola Dasar dan Tujuan Pembangunan Dae - rah Tingkat II Barru.....	24
C. Beberapa Kebijakan Pokok dalam Pem- angunan Daerah.....	28
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Daerah Tingkat II Barru..	35

	hal
1. Geografis.....	35
2. Demografis.....	37
B. Sekilas Tentang BAPPEDA Tingkat II Barru.....	40
1. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Ting kat II Barru.....	41
2. Struktur Organisasi BAPPEDA.....	43
<b>BAB IV. PELAKSANAAN KORDINASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH.....</b>	<b>56</b>
A. Mekanisme Perencanaan.....	56
B. Pelaksanaan Kordinasi dalam Penyusun- an Rencana Pembangunan.....	73
C. Partisipasi Instansi Vertikal dan Di- nas Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan.....	80
D. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh.....	83
1. Pimpinan BAPPEDA.....	83
a. Pimpinan terhadap bawahan.....	83
b. Partisipasi bawahan.....	88
2. Kemampuan Personil dari BAPPEDA....	90
3. Sikap dari Instansi Vertikal dan Dinas Daerah Terhadap Kordinasi...	98
a. Hubungan Kerja BAPPEDA Tingkat II dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah.....	98
b. Peranan dalam Monitoring dan pe-	

	ngawasan.....	hal 100
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	105
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran-Saran.....	106
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		108
L A M P I R A N.....		110



## BAB I

## P E N D A H U L U A N

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dalam penyusunan rencana-rencana tersebut terlibat sejumlah Instansi Vertikal dan Dinas Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kordinasi di perlukan dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dengan kata lain mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian, MPA, PhD, dalam bukunya "Peranan Staf dalam Managemen" (1979 : 111) merumuskan sebagai berikut :

"Kordinasi diperlukan tidak saja sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Akan tetapi juga untuk mengawasi agar tindakan tersebut benar-benar dijalankan dengan cepat".

Bertitik tolak daripada pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa kordinasi merupakan salah satu alat utama organisasi utamanya organisasi pemerintah untuk mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi. Kordinasi diperlukan pada semua tingkat kegiatan organisasi, baik pada tingkat perumusan kebijaksanaan maupun pada tingkat pelaksanaan kegiatan.

Kordinasi pada hakekatnya terdapat pada setiap Instansi Pemerintah dan tidak dapat diabaikan, karena sebagai

alat utama untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai akibat dari kurangnya kordinasi antara instansi-inatansi yang terkait di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih tugas (overlapping) dalam pelaksanaannya.

Untuk mengatur kondisi tersenut diperlukan adanya kordinasi yang **baik** antara berbagai unit pelaksana. Sebagai Badan Pelaksana Perencanaan Pembangunan, Bappeda Tingkat II Barru mempunyai tugas yang sifatnya multidimensional. Untuk lebih mengefektifkan dari pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Tingkat II Barru sangat dibutuhkan adanya **Kordinasi** dalam perencanaan program-program pembangunan.

Kordinasi menurut pengertian administrasi pemerintahan dan pembangunan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan menghindarkan kesimpansiuran dan duplikasi.

Penyelenggaraan kordinasi dalam perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Barru dimaksudkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kemudian daripada itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru sebagai Badan/Staf perencanaan yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah yang mana bertanggung jawab dalam mensingkronisasikan berbagai macam kegiatan yang diajukan dalam Instansi Vertikal dan Dinas Daerah serta Kecamatan yang berada dalam -

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru. Dalam hal ini masih adanya tenaga-tenaga/personil yang kurang baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitasnya.

Untuk itu penulis memilih judul " FUNGSI KORDINASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU " .

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini penulis akan mengemukakan alasan sebagai dasar pertimbangan dalam memilih judul :

1. Menyadari pentingnya pelaksanaan kordinasi Bappeda Daerah Tingkat II Barru terhadap Instansi Vertikal, Dinas Daerah, Kecamatan karena melakukan kordinasi proses perencanaan dapat terlaksana secara terpadu.
2. Dalam melaksanakan kegiatan kordinasi memerlukan tenaga yang terampil dan berpengetahuan dalam bidangnya masing-masing.
3. Tenaga pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru berkewajiban melaksanakan tugas-tugas kantor guna meningkatkan usaha kerjasama yang baik dalam arti peningkatan kerja pembangunan.
4. Kantor Bappeda Tingkat II Barru, penulis jadikan obyek penelitian, karena tertarik salah satu fungsi Managemen (Coofdinating) yang sangat besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan.
5. Disamping itu penulis berasal dari Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, sehingga untuk mengumpulkan data yang

kelak diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijangkau.

## B. Perumusan Masalah

Pemilihan judul skripsi tersebut di atas adalah untuk mencoba menggali wujud daripada pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Tingkat II Barru, apakah fungsi tersebut yang dijalankan sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980.

Oleh karena itu, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 sebagai landasan utama Bappeda Tingkat II Barru dalam menjalankan fungsi Perencanaan pembangunan.

Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980 telah dijelaskan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Tingkat II sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, dan pada Tingkat Dati II diperinci lagi dalam peraturan Daerah Tingkat II Barru nomor 04 Tahun 1982, dan Bappeda mempunyai fungsi melakukan kordinasi diantara Dinas-Dinas Daerah Instansi-Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan-Badan Lainnya dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak mengalami kesimpansiuran dalam pelaksanaannya. Di dalam penetapan rencana pembangunan daerah maka pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Barru, dibantu oleh BAPPEDA melalui tahap-tahap perencanaan pembangunan yang biasa disebut mekanisme perencanaan.



Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas secara singkat, maka perumusan masalah didalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah fungsi yang dijalankan oleh Bappeda Tingkat II Barru sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980.
2. Apakah penyusunan rencana program pembangunan sesuai dengan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah.
3. Apakah hubungan kerja Bappeda Tingkat II Barru Instansi Vertikal, Dinas Daerah yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru sudah berada dalam kordinasi yang baik.

Kordinasi adalah salah satu fungsi Manajemen yang tidak kurang pentingnya karena walaupun fungsi lain telah dijalankan tetapi tanpa disertai kerja sama kordinasi dan hubungan yang baik dengan sendirinya tidak dapat dihindari adanya kesimpansiuran dalam peksanaan tugas sehingga tujuan yang di inginkan sukar dicapai.

Selanjutnya Drs. Melayu S.P. Hasibuan, dalam bukunya "Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah" ( 1985 : 83 ) mengemukakan bahwa kordinasi dapat dibedakan atas :

- 1.Kordinasi Vertikal
- 2.Kordinasi Horisontal".

ad.1. Kordinasi Vertikal, adalah kordinasi yang sifatnya dari atas ke bawah atau menurun, yaitu mulai dari puncak hirarchi organisasi sampai kepada satuan-satuan dasar organisasi dengan maksud agar authority tersa-

lur ke bawah.

ad.2. Kordinasi Horisontal, adalah kordinasi yang sifatnya sejajar, yaitu kordinasi dengan aparat-aparat pemerintahan yang berada dalam lingkungan kerja suatu daerah atau wilayah termasuk jawatan-jawatan, Dinas-dinas daerah, satuan-satuan angkatan bersenjata dan organisasi lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam proses administrasi pemerintahan. Karena pemerintah pada hakekatnya merupakan satu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari unsur aparatur pemerintah sebagai bagian yang harus bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sistem, oleh karena itu dalam pelaksanaan kordinasi, baik vertikal maupun horisontal dalam usaha menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Tingkat II Barru nomor 04 tahun 1982 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru bab II (pasal 3) menyebutkan :

"Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, adalah Badan/Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah".

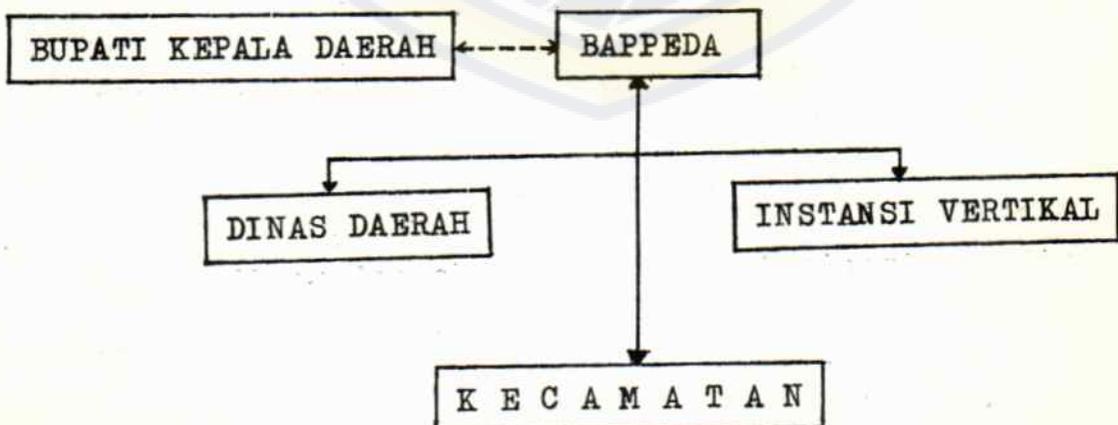
Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat -

II Barru Nomor 04 Tahun 1982 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru bab II pasal 5 (6), menyebutkan :

"Melakukan kordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam wilayah Daerah".

Dari rumusan tersebut di atas bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai badan/staf perencana yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Melakukan kordinasi dalam perencanaan baik secara vertikal maupun horisontal. Kordinasi dalam perencanaan secara horisontal meliputi kordinasi terhadap instansi-instansi vertikal dan Dinas-Dinas Daerah, sedangkan kordinasi vertikal dalam perencanaan adalah kordinasi terhadap pemerintah kecamatan dan dalam perencanaan tersebut dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :

SKEMATI HUBUNGAN KORDINASI ANTARA BAPPEDA  
DENGAN INSTANSI-INSTANSI TERKAIT



Skema tersebut di atas menjelaskan hubungan kordinasi antara BAPPEDA Tingkat II dengan Instansi-Instansi terkait dan Pemerintah Kecamatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II sebagai badan/staf perencana secara konprehensive yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Bappeda dalam penyusunan rencana, dalam hubungan dengan kordinasi dengan Instansi-Instansi Vertikal dan Dinas Daerah bersifat horisontal, sedangkan dalam hubungan dengan Pemerintah Kecamatan adalah kordinasi yang bersifat vertikal. Kemudian daripada itu, dari instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, Bappeda mensingronisasikan data/informasi dan usul-usul.

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian pada Kantor Bappeda Tingkat II adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru telah dapat menjalankan fungsi yang diharapkan sesuai dasar pembentukannya, yaitu melakukan kordinasi secara horisontal dan kordinasi secara vertikal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru.

## 2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan pikiran yang kelak dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam pembinaan administrasi dan proses kelancaran penyelenggaraan perencanaan pembanguna utamanya pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru.
- b. Sebagai salah satu bahan bacaan, khususnya pada perpustakaan Universitas "45" Ujung Pandang.
- c. Sebagai tambahan Pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan karya ilmiah.

## D. Metodo Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru, dan waktu penelitian ini di laksanakan mulai akhir bulan Agustus sampai bulan Oktober 1990.

### 2. Metodo Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, karena untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan terperinci tentang pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh petugas Kantor Bappeda Tingkat II, Instansi Vertikal, Dinas Daerah yang terkait di dalamnya di Kabupaten Dati II Barru.

- b. Sampel

Besarnya sampel ditentukan dengan cara purposive sistimatic random sampling.

Cara penarikan sampel (sampling) adalah semaua kepala kantor, para Kepala Bidang, Instansi Vertikal,- Dinas Daerah dijadikan sebagai responden dengan jumlah 20 (dua puluh) orang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada lazimnya dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan data yang obyektif dan relevan,serta teori yang dijadikan dasar analisa memecahkan masalah.

Untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan karya ilmiah ini berupa skripsi, maka penulis telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

Yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melakukan interview (wawancara) langsung terhadap responden yang menjadi sasaran yakni pejabat atau aparat yang bertanggung jawab atas jalannya roda perencanaan pembangunan diKabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Dalam hal ini responden yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru 1 Orang.
  - Ketua Bappeda Tingkat II Barru 1 orang.
  - ~~S~~ Sekretaris BAPPEDA Tingkat II Barru 1 orang.
  - Para Kepala Bidang pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru sebagai berikut :
1. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan 1 orang.

2. Kepala Bidang Ekonomi 1 orang.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya 1 orang.
4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana 1 orang.

Adapun Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang penulis jadikan responden, karena instansi tersebut sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Barru 1 orang.
2. Kepala Kantor Departemen Pertanian Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Barru 1 orang.
3. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 orang.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1 orang.
5. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum 1 orang.
6. Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Barru 5 orang. di tambah 2 orang sekretaris Kecamatan. Jadi jumlah responden yang digunakan sebanyak 20 orang.

#### 5. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara sederhana manual dan dihimpun dalam bentuk naskah dan tabel dalam penyajiannya.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan, maka diuraikan secara sistematik sebagai berikut :

#### BAB Pertama. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan -

kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB Kedua. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian kordinasi, perencanaan, serta pembangunan, pola dasar dan tujuan pembangunan daerah tingkat II Barru, beberapa kebijaksanaan pokok dalam pembangunan daerah.

#### BAB Ketiga. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum daerah Tingkat II Barru yang meliputi geografi, demografis, sekilas tentang Bappeda Tingkat II Barru yang meliputi tugas pokok dan fungsi Bappeda Tingkat II Barru serta struktur organisasi Bappeda.

#### BAB Keempat. Pelaksanaan kordinasi dan faktor-faktor yang berpengaruh.

Dalam bab ini berisi tentang mekanisme perencanaan, pelaksanaan kordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, partisipasi instansi vertikal dan dinas daerah dalam penyusunan rencana pembangunan, faktor-faktor yang berpengaruh yang mencakup pimpinan Bappeda, kemampuan personil dari Bappeda, sikap dari instansi vertikal dan dinas daerah terhadap kordinasi.

#### BAB Kelima. Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB Kelima, Kesimpulan dan Saran-Saran

Bab ini adalah bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari analisa hasil penelitian dan saran saran.



## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KORDINASI

## A. Beberapa Pengertian Tentang

## 1. Kordinasi

Dalam hubungannya dengan fungsi kordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka setiap instansi vertikal, dinas daerah dan kecamatan - kecamatan yang menyelenggarakan tugas-tugasnya mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam rangka perencanaan pembangunan yang perlu dikordinasikan dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini pejabat yang menyelenggarakan kordinasi tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 04 Tahun 1982 yang telah disinggung sebelumnya. Ia melakukan kordinasi perencanaan diantara dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, kecamatan dan badan lain dalam wilayah daerah, juga melakukan penelitian atas pelaksanaannya. Dengan demikian terlepas dari persoalan pangkat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II sebagai administrator pembangunan. Ini berarti fungsi kordinasi adalah fungsi yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan dan pengembangan usahanya dalam penyelenggaraan tugasnya.



Untuk itu di bawah ini dapat dikatakan beberapa definisi daripada sarjana sebagai berikut :

Leonard D. White berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kordinasi adalah :

"Kordinasi adalah suatu pernyataan terhadap masing-masing bagian antara satu dengan lainnya dan mensekalaraskan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan beserta gerak operasinya agar mereka dapat memberikan sumbangan yang semaksimal mungkin bagi berhasilnya tujuan bersama". (Drs. Sarwoto, 1981 : 16).

George R. Terry yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kordinasi adalah :

"Suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan". (Drs. Melayu S.P. Hasibuan, 1981 : 16).

Sedangkan dalam Kamus Administrasi Negara, yang dimaksud dengan kordinasi adalah :

"Suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kegeparan, atau kekosongan kerja sebagai akibat daripada pekerjaan menghubungkan-hubungkan dan mensekalaraskan orang-orang dan pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu" (Drs. Soekarno, 1979 : 42).

Dari definisi beberapa sarjana tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kordinasi adalah suatu penyesuaian kerja yang etrdapat diantara bagian-bagian satu sama lain itu selalu terarah sehingga keseluruhan bagian dapat memberikan hasil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan dengan efisien dan efektif.

- Fungsi Kordinasi

Berikut ini disebutkan beberapa fungsi daripada kordinasi yang dikemukakan oleh Drs. Soewarno Handayani, (1988 : 199-121) sebagai berikut :

1. Kordinasi sebagai fungsi organik daripada pimpinan yang memiliki keunikan sendiri bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya. Dikatakan unik karena fungsi kordinasi mencakup pula fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, pengawasan dan sebagainya.
2. Kordinasi sebagai usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.
3. Kordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari suatu kerja organisasi.
4. Kordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.
5. Kordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab.
6. Penambahan jabatan dan pejabat (orang-orang) dalam organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam situasi yang demikian ini pelaksanaan organisasi dan masalah hubungan kerja akan menjadi rumit dan mungkin sukar akan tetapi bagaimana juga masalah ini perlu disecahkan.
7. Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan kon-

sekwensi logis daripada perkembangan ilmu pengetahuan teknoligi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialis ini memainkan peranan yang tidak lepas kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih luas. Spesialisasi dalam berbagai tugas dan keanekaragaman tugas menyebabkan usaha kordinasi semakin bertambah besar dan menjadi rumit.

#### - Cara-Cara Mengadakan Kordinasi

Kordinasi sangat diharapkan dan bahkan tidak berlebihan bila dikatakan sebagai faktor yang ikut serta mengadakan ketentuan. Oleh karena itu Drs. Melayu S.P. Hasibuan (1984 : 85) dalam bukunya "Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah" bahwa cara-cara mengadakan kordinasi yaitu :

- "1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan ko kordinasi yang diharapkan.
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.
3. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran mengemukakan ide dan lain-lain.
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan, penciptaan sasaran".

#### 2. Perencanaan

Diantara para sarjana, seperti halnya yang akan dikemukakan oleh Dr. S.P. Siagian, MPA dalam bukunya yang berjudul " Filsafat Administrasi " (1984 : 108) yang mengemukakan pengertian perencanaan sebagai berikut :

"Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan".

Disamping pengertian yang dikemukakan di atas juga apa yang dikemukakan oleh Drs. Pariata Westra, S.H, dalam bukunya yang berjudul "Ensiklopedia Administrasi" (1982: 91) memberikan pengertian perencanaan sebagai berikut :

"Planning atau perencanaan adalah aktivitas pokok dalam manajemen yang menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Pekerjaan perencanaan merupakan salah satu fungsi manager, disamping fungsi-fungsi lainnya : Penggerakan dan pengontrolan".

Dari kedua definisi tersebut di atas, juga terdapat definisi daripada Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, MA, dalam bukunya yang berjudul "Perencanaan Pembangunan" (1976 : 12) dimana beliau mengemukakan pengertian perencanaan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis manusia.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila-mana, dan oleh siapa.
- d. Albert Waterston menyebutkan Perencanaan Pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikutinya agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
- e. Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk -

sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Dengan melihat beberapa pengertian daripada definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka jelaslah bahwa apabila diteliti, kiranya akan menjadi jelas terlihat bahwa perencanaan sebagai salah satu fungsi organik manajemen. Pengertian-pengertian yang diberikan dimuka menunjukkan pula dengan jelas bahwa kiranya para sarjana benar mengatakan bahwa perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Dengan alasan bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk menentukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Perencanaan menjadi fungsi organik pertama karena ia merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya.

Karena rencana adalah suatu keputusan, karena itu kegunaannya akan terlihat setelah dilaksanakannya. Dan ditentukan kemasa yang akan datang, karena ada hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan proses perencanaan.

Suatu rencana yang baik seharusnya memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh

guh mengalami teknik-teknik perencanaan.

4. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana.
7. Rencana harus luwes.
8. Didalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
9. Rencana harus merupakan forecasting.
10. Rencana harus bersifat praktis.

Sedangkan dalam rangka pembuatan suatu rencana sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan secara sistimatis, seharusnya didasarkan kepada langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengetahui sifat hakiki ~~dari~~ masalah yang ~~dihadapi~~.
2. Pengumpulan data-data.
3. Penganalisaan data-data.
4. Penentuan beberapa alternatif.
5. Memilih cara yang terbaik.
6. Pelaksanaan.
7. Penilaian hasil yang dicapai.

Dari uraian tersebut diatas tentang syarat dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembuatan suatu rencana, hal ini tidak terlepas dari rumusan BAPPEDA Tingkat-II melaksanakan fungsinya sebagai suatu lembaga yang ber-

fungsi merencanakan hal-hal yang bersangkutan dengan Pembangunan Daerah Tingkat II.

### 3. Pembangunan

Telah menjadi suatu konsensus bahwa hanya dengan pembangunan yang menyeluruh jalan satu-satunya untuk mewujudkan aspirasi bangsa seperti yang dituangkan oleh rakyat dalam ketetapan MPR yang berpa GBHN. Hal ini terutama disebabkan karena pembanguan itu sendiri merupakan proses perubahan masyarakat yang menyeluruh dalam rangka pembinaan bangsa yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. S. P. Siagian, MPA, dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Pembangunan" (1981 : 3) mengemukakan bahwa :

"Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Bulding)".

Oleh karena pembangunan merupakan upaya perbaikan taraf hidup masyarakat, maka meliputi berbagai lapangan hidup masyarakat yang bersangkutan seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Emil Salim, dalam bukunya yang berjudul "Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan" (1983 : 72) mengatakan bahwa :

"Pembangunan menyentuh praktis segala prikehidupan manusia dalam suatu gerak perubahan".

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian proses perubahan yang tidak hanya ditujukan kepada suatu aspek kehidup-

an perubahan yang positif terhadap berbagai aspek/lapangan hidup masyarakat yang sedang membangun.

Oleh karena pembangunan meliputi kepentingan bangsa baik pemerintah maupun anggota masyarakat, maka jelas dalam proses pembangunan sangat diharapkan keterlibatan pemerintah bersama seluruh anggota masyarakat. Dengan kata lain bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tugas seorang atau kelompok orang tersebut akan tetapi juga adalah tugas pemerintah. Hal ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr Emil Salim (1983 : 72), bahwa :

"Pembangunan dirasakan oleh hampir semua pemerintah-negara berkembang sebagai tugas utama, sehingga campur tangan pemerintah dalam masalah pembangunan, khususnya dalam masalah ekonomi tidak dapat dihindari."

Ini berarti bagaimanapun juga pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan pembangunan yang menyeluruh. Pemerintah harus bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat bergerak kearah tercapainya tujuan pembangunan.

Karena pada dasarnya pembangunan merupakan imbangankewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat. Kewajiban pemerintah disini berupa pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan bantuan. Sedangkan selebihnya didasarkan pada kemampuan seluruh rakyat yang bersangkutan.

Namun suatu hal yang perlu dimaklumi bagi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sedang membangun, sangat diliputi berbagai keterbatasan, sehingga dengan demikian disamping pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan-

sistem skala prioritas selektif, juga harus bertahap serta melibatkan pemerintah dalam banyak hal. Dengan kata lain bahwa masyarakat kita dewasa ini belum sepenuhnya dapat melaksanakan pembangunan tanpa campur tangan pemerintah, bahkan kenyataan dalam awal REPELITA yang lalu dan masih sering didapati dewasa ini bahwa ada dana yang bersumber dari pemerintah.

Sekalipun demikian bukan berarti bahwa pembangunan itu sebaiknya diserahkan sepenuhnya terhadap pemerintah akan tetapi pemerintah disini hanya berfungsi memberikan bantuan dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksananya pembangunan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. S.P. Siagian, MPA, dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Pembangunan". (1983 : 4) yang mengatakan bahwa :

"Dengan demikian kiranya jelas bahwa suatu yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perlu dicegah".

Pada hakekatnya partisipasi masyarakat (Social Participation) merupakan salah satu tugas kewajiban setiap anggota masyarakat. Demikian pula BAPPEDA selaku unsur atau yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal ini Daerah Tingkat II Barru, melaksanakan perencanaan pembangunan secara komprehensif dengan penentuan skala prioritas.

## B. Pola Dasar dan Tujuan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru.

Untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut mengenai potensi yang ada dan wujud masa depan Kabupaten Barru Daerah Tingkat II Barru yang diinginkan dalam konteks Nasional maupun konteks Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, baik dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang maupun jangka panjang agar terlihat korelasi yang terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propensi Sulawesi Selatan serta Garis-Garis Besar Haluan Negara. Maka Pola Dasar Pembangunan ini disusun secara sistimatis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Bab III : Pola Umum Pelita Ke empat Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru adalah garis-garis kebijaksanaan dan arah pembangunan dalam rangka pengembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Barru dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat di Daerah dan bagi pembangunan selanjutnya.

Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Barru adalah merupakan suatu sub Sistem Pembangunan Nasional karena itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru kedudukannya adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Da-



sar Pembangunan Daerah Propensi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat di Daerah dalam rangka pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru sebagai pedoman bagi seluruh aparat pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dan selanjutnya merupakan labdasan bagi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru dalam menyusun REPELITA IV Daerah, rencana pembangunan dan rencana kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Adapun sifat/karakteristik dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai berikut :

- a. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru disusun bersifat lebih konkrit dan akan dijabarkan pada REPELITA IV di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai rencana lima tahun untuk melanjutkan dan meningkatkan pelita-pelita sebelumnya yang dimulai sebelumnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sejak pelita pertama.
- b. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru memberikan penekanan khusus pada terciptanya tata pengembangan wilayah secara terpadu mengingat sifat karakteristik Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai daerah agraris. Hal ini dikembangkan secara cepat menyeluruh dan lebih terarah serta mantap untuk mengembangkan kehidupan ma-

syarakat yang lebih baik dalam rangka terciptanya Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
2. Pola Umum Pembangunan Daerah ini pada hakekatnya merupakan arah dan kebijaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan corak masyarakat beserta lingkungannya yang diinginkan terwujud sebagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjelang tahun 2000 yang akan datang.
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai bagian integral dari Wilayah Negara Republik Indonesia, maka sasaran Jangka Panjang yang ingin dicapai menjelang tahun 2000 adalah sesuai yang telah dijabarkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu dititik beratkan pada Pembangunan di bidang Ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara Bidang Pertanian dan Industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Sedangkan Pembangunan diluar bidang Ekonomi dilaksanakan seiring dengan kemajuan yang diwapai dalam bidang Ekonomi. Perwu-

judan cita-cita Nasional Jangka Panjang tersebut akan dicapai bertahap melalui pelaksanaan serangkaian REPELITA demi REPELITA. Untuk selanjutnya dijadikan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

4. Pola Umum Tata Pengembangan Wilayah Jangka Panjang ini menjabarkan karakteristik Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dalam kaitannya dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Barru berada dalam Sub Wilayah Pembangunan bahagian barat sebagai bagian utama dari lumbung padi Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di samping tanaman lainnya.
5. Pola Umum Tata Pembangunan Wilayah ini akan memberikan kemudahan dalam menentukan alternatif program proyek pembangunan, baik bersifat sektoral, regional, maupun, daerah, sehingga memberikan mamfaat yang tinggi dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu dalam penyusunannya disesuaikan dengan Pola Tata Guna Tana dengan memperhatikan azas kelestarian, azas keseimbangan Pola dan azas pemamfaatan optimal.

Sedangkan Pola Umum Pelita ke empat Daerah Tingkat II Barru dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi pertanian pangan, tanaman industri

bahan sandang dan bahan bangunan yang diharapkan dapat saling menunjang kebutuhan antar Daerah dalam Sub Wilayah Pembangunan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan dalam rangka menunjang kebutuhan untuk mensuplay Wilayah Indonesia Timur.

- b. Peningkatan prasarana dan sarana komunikasi di dalam dan di luar Daerah Sub Wilayah Pembangunan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- c. Peningkatan kordinasi kerja sama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar Kabupaten dalam Wilayah Pembangunan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan utamanya dalam rangka perwujudan program kerja sama.

Sedangkan tujuan daripada Pembangunan Daerah Tingkat II Barru, yang mana merupakan bagian dari Pembangunan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah bertujuan pengembangan potensi manusia secara positif, agar mampu mengelolah dan memanfaatkan alam sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata, adil, baik material maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### C. Beberapa Kebijakan Pokok Dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tingkat II Barru, maka kebijaksanaan arah Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

#### a. U m u m

1. Arah kebijaksanaan selama PELITA III dilanjutkan dan

ditingkatkan serta disempurnakan pada PELITA IV Kabupaten Daerah Tingkat II Barru yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. Perluasan kesempatan kerja akan lebih ditingkatkan melalui latihan-latihan keterampilan, perluasan usaha-usaha dan program-program yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3. Pembinaan pengusaha ekonomi lemah, akan lebih ditingkatkan agar supaya dapat memperluas dan meningkatkan usahanya melalui usaha-usaha pemberian bantuan permodalan, peningkatan keahlian, kemampuan keahlian dan pemasaran hasil-hasil produksinya.
4. Pembanguna Pedesaan dilaksanakan secara terkoordinir melalui wadah LKMD/PKK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan untuk mempercepat Desa Swasembada.
5. Pembinaan aparatur pemerintah diarahkan kepada pembentukan sikap mental bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, bersih, cakap, mampu, bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna.
6. Menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa/Kelurahan makin tertib dan efektif.
7. Meningkatkan hubungan kordinasi antara pemerintah Daerah dengan Muspida dan para Pimpinan Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten.

8. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Bupati Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Barru.

b. Kebijakanaksanaan Sektoral

1. Melaksanakan intensifikasi terpadu dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan dengan kreteria :
  - a. Harus lebih meluas dengan mutu intensifikasi yang semakin meluas dan meningkat.
  - b. Kelompok tani yang makin meningkat dan lebih maju.
  - c. Diversifikasi yaitu penganekaragaman antara palawija.
  - d. Pembinaan KUD yang semakin berkembang dan sehat.
  - e. Peningkatan pembinaan pasca panen serta penganpaan pangan yang cukup tinggi.
2. Melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi dibidang perkebunan, tanaman, perdagangan dan industri.
3. Dibidang keagrariaan diharapkan kepada pelaksanaan-catur tertib pertanahan yang meliputi :
  - a. Tertib Hukum Pertanahan.
  - b. Tertib Administrasi Pertanahan
  - c. Tertib Penggunaan Tanah.
  - d. Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan hidup.
4. Dibidang industri diarahkan kepada pengembangan industri kecil, aneka industri untuk mengolah hasil-hasil pertanian serta sumber-sumber alam lainnya.
5. Meningkatkan Peranan BUUD/KUD dan Koperasi Primer

melalui peningkatan aparat, organisasi dan permodalan.

6. Pembangunan pasilitas pendidikan dititik beratkan Pendidikan Dasar dan Sekolah Kejuruan. Pada Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sekolah menengah Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi di tuju-kan kepada peningkatan mutu pendidikan.
7. Usaha Pembangunan Kesehatan, ditujukan kepada Peningkatan pelayanan kesehatan agar letak sarana keseha-tan mudah tercapai dengan biaya yang terjangkau o-leh masyarakat pedesaan.

Dengan demikian pembangunan PUSKESMAS Pembantu yang sampai kini sudah dilaksanakan disemua Kecamatan dan bebe-rapa Desa/Kelurahan perlu tetap ditingkatkan. Disamping i-tu perlu dibarengi dengan usaha peningkatan penyuluhan dan gizi, yang selama ini telah dilaksanakan melalui kegiatan -kegiatan P2WKSS (Demonstrasi Makanan Bergizi, Pembentukan-Tenaga Gizi, danlain-lain).

### **c. Kebijaksanaan Spasial (Tata Ruang)**

Kebijaksanaan Spasial tata ruang dimaksudkan agar pembangunan Daerah dapat berjalan dengan serasi, dengan de-mikian perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sek-toral dengan pembangunan wilayah artinya di dalam setiap kegiatan pembangunan, disamping pertimbangan sektoral ha-rus pula menggunakan pertimbangan wilayah yang mengarahkan kepada pengelolaan sumber daya yang optimal dengan memper-

hatikan dengan kelestarian hidup. Selain itu perlu di usahakan adanya keserasian laju Pembangunan antar Wilayah Pembangunan dan Wilayah Perkotaan, begitu pula sebaliknya.

Dalam melaksanakan pembangunan di Daerah ini dibutuhkan adanya pola tata ruang dalam rangka pembangunan sektoral wilayah tertentu sehingga secara agregatif dan integrogatif memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka kelestarian lingkungan hidup dan keterpaduan yang lebih baik. Demikian daerah ini yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Desa/Kelurahan dan ditambah 10 (sepuluh) Desa Persiapan dan 157 (seratus lima-puluh tujuh) Lingkungan dan Dusun.

Denga demikian, optimasi tata ruang Wilayah dapat dicapai melalui :

- a. Usaha mengembangkan kegiatan pembangunan antar wilayah agar laju pertumbuhannya tidak terjadi jurang antara wilayah dengan lainnya.
- b. Usaha mengalokasikan kegiatan pembangunan pada wilayah pembangunan, sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.
- c. Usaha menciptakan hubungan ekonomi sosial budaya antar wilayah pengembangan dengan wilayah perkotaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan di dasarkan pada letak geografis, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Barru pada REPELITA V di bagai dalam 2 (dua) Wilayah pe-

ngembangan dan 1 (satu) Wilayah Perkotaan yaitu :

1. Wilayah A (Dataran Rendah).

Wilayah ini meliputi yang terdapat pada Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Mallusetasi dengan luas wilayah 37365 Ha atau 31,08 % dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru. Dengan kondisi geografis yang agak rata disertai sokun (lapisan yang relatif agak dalam, - sehingga memungkinkan untuk mengembangkan berbagai jenis kompditi antara lain :

- a. Perikanan, tambak, budi daya laut (meluasa, rumput laut, teripang dan mutiara) dan perikanan lepas pantai.
- b. Industri kecil termasuk industri rumah tangga dan kerajinan hasil laut.
- c. Perkebunan termasuk kelapa dalam dan kelapa hybri da.
- d. Peternakan termasuk ayam ras dan buras.
- e. Pangan termasuk padi dan palawija.

2. Wilayah B (Dataran Tinggi).

Wilayah ini meliputi dataran tinggi yang terdapat pa da Kecamatan Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Soppeng Ri aja, Kecamatan Mallusetasi dengan luas wilayah : 80.107 Ha atau 68,79 % dari luas wilayah Kabupaten Dati II Barru. Se suai kondisi geografis yang berbukit dengan lapisan Topsoil yang relatif agak dangkal, namun masih memungkinkan untuk

mengembangkan berbagai komoditi antara lain :

- a. Perkebunan : jambu mente, kapas, tembakau.
- b. Peternakan besar : sapi.
- c. Hortikultura : Mangga, nangka, dan jeruk.

### 3. Wilayah C (Perkotaan).

Sesuai dengan Rencana Induk Kota (RIK) di tetapkan bahwa luas wilayah kota (perkotaan) sekitar 1.500 Ha yang meliputi sebagian Wilayah Kelurahan Tuwung dan sebagian wilayah Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru. Pada wilayah ini diharapkan akan mampu diwujudkan terbentuknya kota 3 (tiga) dimensi yakni :

1. Sebagai pusat Pemerintahan.
- 2, Sebagai pusat perekonomian, perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya.
3. Sebagai pusat pelayanan sosial budaya.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Daerah Tingkat II Barru.

Kabupaten Dati II Barru merupakan salah satu dari 23 Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 (Lembaga Negara No. 74 Tahun 1959) tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Propensi Sulawesi Selatan yang Wilayahnya sebelum dibentuk menjadi Daerah Otonom yang berstatus Onder Afdeling dibagi menjadi 4 (empat) Wilayah Swapraja yaitu :

1. Swapraja Barru.
2. Swapraja Tanete.
3. Swapraja Soppeng Riaja.
4. Swapraja Mallusetasi.

Dan realisasi pembentukannya dilaksanakan menurut Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.

##### 1. Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat II Barru yang terletak kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>, sebelah Utara Ibu Kota Propensi Sulawesi Selatan (Ujung Pandang) yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang lebih kurang 78 Km dilalui jalan Negara yang menghubungkan Kota Madya Ujung Pandang dan Kota Madya Pare-Pare dan melintang ke Timur yang dilalui jalan Negara sepanjang 35 Km yang menghubungkan Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng dengan luas 1.174,72 Km<sup>2</sup> yang terletak

sekitar  $4^{\circ}, 0,5^{\circ}, 49^{\circ} - 4^{\circ}, 47^{\circ}, 35^{\circ}$  Lintang Selatan dan antara  $119^{\circ}, 35^{\circ}, 00^{\circ} - 119^{\circ}, 49^{\circ}, 16^{\circ}$  Bujur Timur dan berada di atas ketinggian 0 - 1000 meter dari permukaan laut.

Adapun letak Kabupaten Daerah Tingkat II Barru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Madya Pare - Pare.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, Kabupaten Dati II Sidrap dan Kabupaten Dati II Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep dan Kabupaten Dati II Maros.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Secara Administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Barru yang luasnya  $1.174,72 \text{ Km}^2$  itu terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 17 Desa, 7 Kelurahan, 17 Desa Defenitif serta 100 Desa Persiapan dan terdiri 157 Dusun/Lingkungan. Daerah ini berada di bawah kordinasi pembantu Gubernur Wilayah II Pare-Pare.

Untuk lebih jelasnya luas Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dapat di perinci menurut Wilayah Kecamatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I  
 LUAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU  
 DIPERINCI MENURUT KECAMATAN 1989.

No. !	Nama Kecamatan	!! Luas/Km <sup>2</sup>	! Persentase	!
! 1. !	Kecamatan Barru	!! 219,37	! 18,7	!
! 2 !	Kecamatan Soppeng Riaja	!! 171,05	! 14,6	!
! 3 !	Kecamatan Tanete Rilau	! 79,17	! 6,3	!
! 4 !	Kecamatan Tanete Riaja	! 488,55	! 41,6	!
! 5 !	Kecamatan Mallusetasi	! 216,58	! 18,7	!
!	B A R R U	! 1.174,72	! 100	!

Sumber Data : Kabupaten Barru dalam angka Tahun 1989.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tanete Riaja mempunyai Wilayah yang paling luas 488,55 Km<sup>2</sup> atau sekitar 41,6 % dari luas keseluruhan Kabupaten Dati II Barru. Sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Tanete Rilau dengan luas 79,17 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,3 % dari luas keseluruhan Kabupaten Dati II Barru.

## 2. Demografi

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Statistik Kabupaten Dati II Barru, jumlah penduduk pada akhir tahun 1989 adalah 143.825 jiwa yang terdiri atas 67.837 jiwa laki-laki dan wanita sebanyak 75.950 jiwa.

Kepadatan penduduknya sebanyak 122 jiwa perkilometer persegi dan dihuni 25 Kepala Keluarga.

Dan distribusi penduduk menurut jenis kelamin yaitu dari tingkat umur 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-24 tahun, 25-49 tahun, 50 tahun ke atas.

Jadi secara terperinci dapat di lihat pada tabel berikut ini :

TABEL II

DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU.

No.	Tingkat Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Persen
		Laki-laki	Wanita		
1.	0 - 4 tahun	9.441	9.102	18.543	13
2.	5 - 9 tahun	9.270	8.837	18.107	13
3.	10-14 tahun	10.387	9.594	19.981	14
4.	15-24 tahun	15.359	15.145	30.504	21
5.	25-49 tahun	18.950	22.751	41.701	29
6.	50 th.keatas	5.669	9.448	15.117	10
! Jumlah		69.076	74.877	143.953	100

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Barru 1987.

Sedangkan laju perkembangan penduduk 5 ( lima ) tahun mulai dari tahun 1985 - 1989 dapat diperinci menurut jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL III

LAJU PERKEMBANGAN PENDUDUK SELAMA 5 TAHUN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU.

! No. !	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		! Laki-Laki !	! Wanita !	
! 1. !	1985	! 66.128 !	! 73.298 !	! 139.426 !
! 2. !	1986	! 67.015 !	! 74.819 !	! 141.834 !
! 3. !	1987	! 67.731 !	! 75.593 !	! 143.324 !
! 4. !	1988	! 67.740 !	! 75.776 !	! 143.516 !
! 5. !	1989	! 68.023 !	! 75.157 !	! 143.180 !

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka, 1989.

Sedangkan komposisi penyebaran penduduk di Kabupaten Dati II Barru pada akhir tahun 1989, dapat di lihat pada tabel berikut ini yang di perinci menurut Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

TABEL IV

KOMPOSISI PENYEBARAN PENDUDUK DI KABUPATEN  
DATI II BARRU TAHUN 1989.

! No. !	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah ! (jiwa) !
		! Laki-laki !	! Wanita !	
! 1. !	Barru	! 15.982 !	! 17.558 !	! 33.540 !
! 2. !	Soppeng Riaja	! 12.558 !	! 13.720 !	! 26.278 !
! 3. !	Tanete Rilau	! 13.644 !	! 15.817 !	! 29.461 !
! 4. !	Tanete Riaja	! 15.523 !	! 16.993 !	! 32.516 !
! 5. !	Mallusetasi	! 10.316 !	! 11.087 !	! 21.403 !
!	B a r r u	! 68.023 !	! 75.175 !	! 143.198 !

Sumber Data : Kabupaten ~~dalam angka tahun~~ 1989.

## B. Sekilas Tentang Bappeda Tingkat II Barru

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Tujuan Pembangunan Daerah adalah sama dengan Tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata, spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan itu bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional maka dibentuklah suatu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II yang mana mengkoordinir langsung Pembangunan yang langsung di laksanakan di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tanggal 28 Agustus 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, demi untuk kepentingan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan sejauh mungkin menyeragamkan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, maka di buatlah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1982 ayat 2 menyatakan bahwa :

"Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru adalah Badan/Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah".

Kemudian pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa :

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Pimpin oleh Ketua".

a. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Daerah Tingkat II Barru.

Untuk melihat dan mengetahui fungsi Bappeda terlebih dahulu penulis memberikan kejelasan tentang kedudukan Bappeda Tingkat II Barru dengan dasar pembentukannya.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Kepres No. 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II se Indonesia.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru No. 16/1983 seri D Nomor 15).

Dengan melihat perumusan di atas ini kiranya dapat dijadikan pegangan pokok dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan serta tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru sebagai salah satu Unit Organisasi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yang melakukan perencanaan umum dan tujuan agar dapat memberi petunjuk, pedoman, persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pembangunan di Daerah mulai dari Rencana Pembangunan Lima Tahun di Daerah, Rencana Tahun Daerah, Monitoring dan pengendaliannya baik untuk

Pembangunan Sektoral maupun untuk Pembangunan Regional.

Berhubung dengan luasnya bidang dan ruang lingkup perencanaan umum yang sangat memungkinkan adanya tumpang tindih didalam melaksanakan tugas, maka perlu diadakan pembagian kerja, dimana tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru adalah membantu Bupati Kepala Daerah di dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru mempunyai fungsi yang mencakup :

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah.
2. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
3. Mengurus program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada angka satu dan dua diatas baik yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.
4. Melakukan Kordinasi Perencanaan diantara Dinas satuan organisasi lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Barru.

5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Barru dengan Kordinasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Barru.
6. Melakukan Kordinasi atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru.

#### b. Struktur Organisasi Bappeda

Sebelum diuraikan struktur organisasi BAPPEDA terlebih dahulu diuraikan pengertian daripada pengorganisasian agar lebih mudah dipahami struktur organisasi pada BAPPEDA Tingkat II Barru. Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Administrasi". (1979 : 116) yang mengatakan bahwa :

"Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan".

Dalam membicarakan pengorganisasian, tidak lepas kaitannya dengan hakekat organisasi, bilamana organisasi merupakan alat Administrasi dan Managemen, maka pada hakekatnya di tinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah atau sebagai tempat kegiatan Administratif dan Managemen dilaksanakan serta bersifat relatif dan statis.
2. Organisasi sebagai proses, yaitu merupakan interaksi orang-orang didalam organisasi itu sendiri.

Dalam hal ini organisasi sebagai proses dengan sendirinya bersifat dinamis daripada sebagai wadah, organisasi sebagai proses diperhadapkan kita kedalam dua jenis hubungan yang terdapat di dalam organisasi yaitu hubungan formal dan hubungan informal.

Dalam penyusunan/pembentukan Struktur Organisasi BAP PEDTA Tingkat II Barru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Dati II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Indonesia, dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian Pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara Pembangunan Sektoral dan Pembangunan Regional dalam rangka usaha menjamin laju perkembangannya, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh dan terpadu disegala sektor.

Adapun Peraturan Daerah tentang Susunan Struktur Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat



II Barru dengan Nomor 04 Tahun 1982 tanggal 28 Juni, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru berdasarkan beban kerja yang di pikulnya, dapat di bagi dalam 3 (tiga) type yaitu :

1. BAPPEDA Tingkat II Type A
2. BAPPEDA Tingkat II Type B
3. BAPPEDA Tingkat II Type C

Sehubungan dengan maksud di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru termasuk ke dalam golongan BAPPEDA Tingkat II Type C, yang terdiri dari seorang Ketua yang kedudukannya sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Didalam menjalankan tugasnya di bidang perencanaan, khususnya dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Barru senantias di bantu oleh beberapa bagian dalam lingkungan organisasi yang dipimpinya, kemudian bertanggung jawab kepadanya. Adapun bagian - bagian yang membantu Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut :

- "BAPPEDA Tingkat II Type C terdiri dari :
- a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan
  - d. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
  - e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana".

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 04 Th. 1982

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 16/1983 Seri D Nomor 15, dengan tugas masing-masing Kepala-Bagian sebagai berikut :

a. Ketua

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis Administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat II Barru untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Bappeda Tingkat II Barru.
2. Melakukan urusan keuangan.
3. Melakukan urusan umum.

Sekretaris terdiri dari :

1. Urusan penyusunan rencana kegiatan.
2. Urusan Keuangan.
3. Urusan Umum.

ad. 1. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan.

ad. 2, Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

ad. 3. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

c. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan

Kepala Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

1. Mengumpul dan menganalisa data serta membina statistik.
2. Melakukan penilaian dan bimbingan atas pelaksanaan pembangunan di Daerah.
3. Melakukan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

1. Seksi Pengumpulan Data.
2. Seksi Analisa dan Penilaian.
3. Seksi Pelaporan.
4. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

ad.1. ~~Seksi Pengumpulan Data~~ mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan pembangunan.

ad.2. Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksana -

naan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian.

ad.3. Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan-hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah.

ad.4. Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

d. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pertanian koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan, kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa.
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah Satuan Organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah Tingkat II Barru Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan Badan lainnya yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru.

3. Melakukan Inventarisasi permasalahan dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah - langkah kebijaksanaan dan pemecahannya.
4. Melakukan atau mengkordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang meliputi kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:

1. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
  2. Seksi Pertanian.
  3. Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi.
  4. Seksi Industri dan Jasa.
- ad.1. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mem-  
persiapkan penyusunan rencana dan program pe-  
layanan sosial dan kesejahteraan rakyat.
- ad.2. Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan  
bahan penyusunan rencana dan program pertanian  
tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebu-  
nan dan kehutanan.
- ad.3. Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi mempunyai

tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana - dan program usaha pengkoperasian dan pemasaran produksi.

ad.4. Seksi Industri dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program perindustrian, jasa, angkutan, perbangkan, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.

e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi :

1. Melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan pengairan perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lainnya yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru.
3. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik

serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, penghubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam lingkungan hidup dalam rangka REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang di usulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

1. Seksi Pengairan
2. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
3. Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi
4. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru mempunyai Pedoman Tata Kerja sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugasnya : Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, Para Kepala Seksi dan Para Kepala Urusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

- a. Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru wajib mema -

tuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- b. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- c. Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II Baru wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan instansi di Daerah Tingkat I dan Daerah-Tingkat II secara hirachi.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Baru bersama-sama dengan instansi-instansi vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Baru dalam melaksanakan kegiatannya wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dengan Rencana Daerah serta rencana antar Daerah.

Hubungan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II bersifat konsultatif fungsional dan hubungan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersifat konsultatif Nasional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka me-

nyusun rencana Anggaran Belanja Daerah Tingkat II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah yang bersangkutan serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing program penyusunan rencana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) II Barru tahun yang bersangkutan secara keseluruhan, dikordinasikan oleh sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Barru.

Dengan pembagian tugas yang jelas, baik antara pimpinan dan bawahan, maka tiap pegawai atau organisasi dapat melaksanakan tugas menurut bidang tugas yang dibebankan atau yang telah ditetapkan.

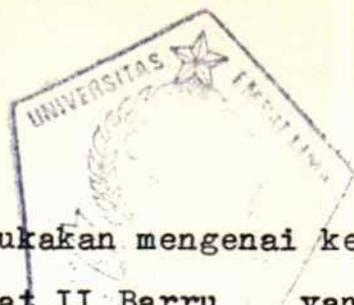
Untuk lebih jelasnya penulis perlu mengemukakan keadaan personil BAPPEDA Tingkat II Barru sebagai berikut :

TABEL V

KEADAAN PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEM-  
BANGUNAN DAERAH TINGKAT II BARRU TAHUN 1988.

! NO. !	PANGKAT/GOLONGAN	!	JUMLAH	!	KETERANGAN
! 1. !	III/d	!	1	!	Ketua !
! 2. !	III/c	!	1	!	!
! 3. !	III/b	!	3	!	!
! 4. !	III/a	!	2	!	!
! 5. !	II/d	!	1	!	!
! 6. !	II/c	!	3	!	!
! 7. !	II/b	!	3	!	!
! 8. !	II/a	!	2	!	!
! 9. !	I/b	!	2	!	!
!	J U M L A H	!	18	!	!

Sumber Data : Kantor Bappeda Tingkat II Tahun 1988.



Lebih lanjut penulis perlu mengemukakan mengenai keadaan pendidikan personil BAPPEDA Tingkat II Barru yang sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi seperti pada tabel berikut ini :

TABEL VI  
KEADAAN PENDIDIKAN PEGAWAI BAPPEDA  
TINGKAT II BARRU TAHUN 1988.

NO. !	PENDIDIKAN !	JUMLAH !	KETERANGAN !
! 1. !	! S a r j a n a !	! 8 !	! !
! 2. !	! Sarjana Muda !	! 4 !	! !
! 3. !	! S L T A !	! 3 !	! !
! 4. !	! S L T P !	! 2 !	! !
! 5. !	! S D !	! 1 !	! !
! !	! J U M L A H !	! 18 !	! !

Sumber Data : Kantor Bappeda Tingkat II Barru, 1988.

BAB IV  
PELAKSANAAN KORDINASI DAN FAKTOR-FAKTOR  
YANG BERPENGARUH.

A. Mekanisme Perencanaan

Pada bagian ini yang membicarakan tentang mekanisme perencanaan, ini bertujuan untuk memperoleh keserasian keterpaduan dalam rangka penyusunan rencana program / proyek pembangunan di Daerah maka di perlukan kordinasi antara instansi-instansi vertikal, dinas otonom dan unit-unit kerja lainnya dalam Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu sistem kordinasi yang dapat menjamin terciptanya mekanisme kerja dalam penyusunan dan pengusulan rencana program/proyek pembangunan di Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1981 tentang peningkatan kordinasi perencanaan dan pengendalian suatu program/proyek sektoral yang masuk Desa dengan menganut sistem perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) dengan melalui pembahasan dalam berbagai tahap/tingkatan diskusi dan konsultasi perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa atau Lurah, Camat, tingkat Interen BAPPEDA Tingkat II, Bappeda Tingkat I, tingkat Regional dan tingkat Nasional. Hal ini dimaksudkan agar supaya dapat menjamin adanya keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh tanah air.

Dalam hubungannya dengan wewenang dan fungsinya membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan memegang peranan penting dalam upaya mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana program/proyek dari Instansi Vertikal, Dinas Otonom dan Unit Kerja lainnya dalam Wilayah Dati II Barru.

Sehubungan dengan itu berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 302/V/8 tentang mekanisme Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah sebagai tindak lanjut dari pada instruksi Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 1981 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/189/BANGDA, tentang persiapan penyusunan rencana program/proyek tahunan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru melaksanakan penyusunan dan pengusulan rencana program / proyek pembangunan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

**Tahap Pertama :** Tahap musyawarah pembangunan tingkat Desa atau Kelurahan, yaitu setiap tahun sedini-mungkin LKMD yang di pimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan bimbingan Camat dan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kecamatan mengadakan kegiatan inventarisasi potensi Desa, permasalahan dan sasaran pemecahannya dan selanjutnya penyusunan

sunan usulan rencana program atau proyek pembangunan baik yang dibiayai dengan Swa daya Desa maupun yang diusulkan untuk dibiayai oleh Bantuan Pembangunan Desa, APBD Tingkat II dan APBD Tingkat I serta APBN untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat guna dibahas dalam temu karya pembangunan tingkat Kecamatan. Waktu penyelenggaraan-musyawarah pada bulan Maret/April setiap tahun. Kemampuan perencanaan dari bawah terutama dari Desa masih sangat kurang dan oleh karena itu BAPPEDA Tingkat II bersama-sama dengan Kantor Pembangunan Desa Tingkat II tidak dapat melepaskan begitu saja pelaksanaan diskusi ini untuk mencegah jangan sampai hasil diskusi tersebut hanya akan merupakan daftar keinginan yang tidak didasarkan kepada kebutuhan utama bagi Desa.

**Tahap Kedua :** Tahap Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan dilakukan dalam bentuk diskusi UDKP dan Temu Karya LKMD, yang dipimpin oleh Camat dengan bimbingan BAPPEDA Tingkat II dan di bantu oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa dengan tujuan membahas kembali rencana program/proyek pembangun-

an Desa/Kelurahan guna memperoleh keterpaduan program/proyek pada tingkat Kecamatan.

Peserta Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan baik dalam bentuk Temu Karya LKMD maupun diskusi UDKP Wilayah Kecamatan dan aparat Dinas Instansi Vertikal di Tingkat Kecamatan. Waktu penyelenggaraannya pada bulan April/Mei, dan di harapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan berikut ini:

1. Usul rencana program/proyek akan dibiayai baik oleh swadaya masyarakat Desa/Kelurahan maupun oleh Bantuan Pembangunan Desa, dikembalikan pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

2. Usul rencana/program yang sudah diselesaikan akan dibiayai oleh APBD dan APBN di teruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk selanjutnya di bahas dalam forum rapat kordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II.

Sebelum diskusi ini dimulai Camat beserta staf dengan bimbingan BAPPEDA Tingkat II dan Kantor Pembangunan Desa Daerah Tingkat II harus mentabulasi seluruh program/proyek yang secara tentatif

telah di majukan/di usulkan oleh Desa/Kelurahan untuk melaksanakan melalui swadaya masyarakat atau melalui bantuan Desa/Kelurahan. Begitu Camat perlu menganalisa data program/proyek guna mengetahui apakah terdapat dua atau tiga Desa atau lebih yang berdekatan, perlu menggabungkan potensi swadaya atau Inpres Bantuan Desa yang bersangkutan untuk memecahkan masalah pembangunan yang dihadapi bersama dan manfaatnya dirasakan bersama oleh Desa.

**3. Mengelompokkan usul/gagasan program/proyek yang diusulkan oleh Desa, berdasarkan Instruksi MENPAN/Wakil Ketua BAPPENAS Nomor 1799/WK/9/1981, dan mentabulasi/menganalisa data program/proyek.**

**Tahap Ketiga :** Pada tahap ini yaitu Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) Daerah Tingkat II. Pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, meminta kepada Dinas, Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, Instansi Vertikal/Lembaga Vertikal untuk mengajukan usul rencana program/proyek pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang. Bappeda Tingkat II mempersiapkan-

bahan-bahan sebagai patokan usulan rencana program/proyek bagi Instansi Vertikal/Dinas atau Satuan Organisasi memperhatikan usul-usul program/proyek disertai analisa pendahuluan tentang kelayakan. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap Instansi/Dinas atau Satuan Organisasi lainnya sebaiknya mempersiapkan studi pendahuluan ini pada bulan April sampai pertengahan bulan Juni.

Dalam hal ini Instansi/Dinas atau satuan organisasi tidak memiliki tenaga ahli atau program/proyek tersebut dianggap tidak memerlukan studi kelayakan pendahuluan maka yang harus dipersiapkan adalah laporan dan evaluasi proyek dengan menggunakan kerangka logis. Selain itu dalam tahap ini hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II bekerja sama dengan bagian keuangan, perlu melaksanakan kegiatan seperti berikut ini :

1. Meninjau kembali pelaksanaan/pengumpulan pendapatan Daerah Tingkat II, sekaligus kesulitan-kesulitannya dan usaha-usaha untuk peningkatan/perbaikan.
2. Membuat rekomendasi yang perlu untuk-

perbaikan dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan Daerah Tingkat II, untuk perubahan dalam tarif pajak, perluasan jenis atau obyek pajak dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Mengsistimasi kembali jumlah dan rutin dan pembangunan yang diharapkan dapat diterima untuk tahun anggaran yang akan datang.

4. Mengsistimasi kembali jumlah dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres lainnya yang tersedia untuk tahun anggaran yang akan datang.

Estimasi jumlah dana akan menjadi penun- tun bagi BAPPEDA Tingkat II, Dinas pen- dapatan dan bagi keuangan dalam membim- bing atau mengarahkan Dinas-Dinas Dae- rah Tingkat II dan Lembaga-Lembaga da- lam menyusun prioritas program / proyek dan kegiatan dalam tahun anggaran yang akan datang, adalah :

a. Untuk melengkapi bahan penyusunan pro- gram/proyek pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya, selain mengguna- kan paket usul rencana program/proyek

pembangunan Hasil Rumusan Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan, maka Bupati Instansi Lembaga Vertikal mengajukan usul rencana Tahunan masing-masing.

b. Di bawah koordinasi Ketua Bappeda Tingkat II usul rencana program/proyek hasil Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan dan usul rencana program atau proyek secara interen dibahas dan diolah lebih dahulu bersama-sama dengan bagian pembangunan dan bagian keuangan sekretariat Wilayah serta Kepala Kantor Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan.

c. Dengan petunjuk dan bimbingan Bupati baik mengenai strategi maupun prioritas pembangunan sesuai Pelita Nasional dan Daerah, maka di bawah koordinasi Ketua BAPPEDA Tingkat II usul rencana program/proyek pembangunan dibahas lagi dalam suatu forum rapat koordinasi Pembangunan Tingkat II yang dihadiri para Wilayah Kecamatan, Instansi atau Lembaga Vertikal dan Satuan Organisasi dalam Wilayah Sekreta -

riat Wilayah Daerah Tingkat II.

d. Waktu penyelenggaraan Rapat Kordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II sebaiknya dilakukan pada bulan Mei/Juni, dan diharapkan dapat menghasilkan rumusan atau usul program/proyek Pembangunan sebagai berikut :

- Yang akan dibiayai oleh APBD asli Tingkat I.
- Yang akan dibiayai oleh APEN, di usulkan lewat Sektoral/Instansi Vertikal di Propensi Daerah Tingkat I.
- Yang akan dibiayai oleh Program Bantuan Pembangunan Desa (INPRES).
- Yang akan diusulkan sebagai proyek khusus (BANPRES), kerjasama Luar Negeri dan lain-lain.

Usul-usul program/proyek/Instansi oleh Bupati dimuat dalam format-format yang ditentukan dan dikelompokkan sesuai petunjuk surat Edaran MENPAN/Wakil Ketua BAPPENAS No.1789/WK/9/1981 tanggal 3 September 1981 selanjutnya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Up. Ketua Bappeda Tingkat I dan Kepada Ketua BAPPENAS Up. Depu-



ti Bidang Regional dan Daerah serta Menteri Luar Negeri Up. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah. Penyempurnaan Dokumen Rencana Proyek (DRAP) seperti diketahui bahwa rencana proyek sebagai usaha atau kegiatan yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu hasil tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu melalui penyediaan dan pengelolaan masukan-masukan proyek berupa dana, tenaga, teknologi dan sebagainya, maka selayaknyalah bila pada awal perumusan masalah pengendaliannya dan pelaksanaannya sudah diperhitungkan pula. Guna memudahkan pengendaliannya bila usul itu disetujui.

Tahap Keempat : Tahap Kordinasi Pembangunan ( RAKORBANG) Daerah Tingkat I.

Pada tahap ini hendaknya diperhatikan :

1. Untuk melengkapi bahan penyusunan program atau proyek Pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya, selain menggunakan paket usul rencana program/proyek pembangunan. Hasil Rumusan Rapat Kordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II, maka Gubernur Kepala Daerah -

Tingkat I, meminta kepada Dinas, Instansi/Lembaga Vertikal dan Satuan-Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Wilayah Tingkat I, untuk mengajukan usul rencana program/proyek pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya.

2. dibawah kordinasi Bappeda Tingkat I, usul rencana program/proyek Pembangunan Daerah Tingkat II dan usul program/proyek Pembangunan secara in-teren dibahas dan diolah lebih dahulu bersama-sama Biro Bina Pembangunan dan Bina Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I serta Direktorat Pembangunan Desa Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
3. Dengan petunjuk, bimbingan dan penga-rahaman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I baik mengenal strategi maupun pri-oritas Pembangunan sesuai REPELITA - Nasional dan PELITA Daerah, maka di-bawah Kordinasi Ketua BAPPEDA Ting- kat I usul Rencana Program/proyek pembangunan dibahas lagi dalam forum Rapat kordinasi pembangunan Daerah -

Tingkat I yang dihadiri oleh BAPPEDA Tingkat II dalam lingkungannya, Dinas, Instansi Lembaga Vertikal dan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I, dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan dan keserasian program Pembangunan pada Tingkat Propensi.

4. Waktu penyelenggaraan Rapat Kordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I pada bulan Juli dan bulan Agustus. Diharapkan dapat menghasilkan rumusan usul-usul dari program/proyek pembangunan sebagai berikut :

a. Yang dinilai cukup dibiayai oleh APBD.

b. Yang dinilai cukup dibiayai oleh APBD dari Daerah Tingkat I, selanjutnya dituangkan dalam rencana APBD Daerah Tingkat I dengan perhitungan kemungkinan adanya usul program/proyek yang bagi daerah prioritas, tapi usul rencana program / proyek tidak ditampung oleh APBN/ sektor.

c. Yang akan dibiayai oleh Bantuan

Pembangunan (INPRES).

d. Yang dinilai masih diusulkan untuk dibiayai oleh APBN untuk dibahas dalam Forum Konsultasi Nasional Pembangunan.

e. Yang dinilai masih diusulkan untuk dibahas lagi dalam Forum Konsultasi-Regional Pembangunan.

f. Yang diusulkan sebagai proyek khusus (Bantuan Presiden, kerjasama Luar Negeri).

g. Yang diusulkan untuk dibiayai oleh Swasta dan Perbankan.

**Tahap Kelima :** Tahap Konsultasi Regional Pembangunan.

Setelah mengkaji faktor kebersamaan dan faktor-faktor lain yang mendorong dan melatarbelakangi persiapan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya dalam forum konsultasi Regional Pembangunan akan dibahas :

1. Rencana program pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam REPELITA Nasional dan REPELITA Daerah masing-masing dan sejauh mana rencana program tersebut telah dapat dan yang belum dapat dilaksanakan sekaligus mengkaji masa -

lah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan.

2. Usul program/proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama baik seluruh maupun sebagai Daerah yang bersangkutan dalam satu Wilayah Pembangunan utama sebagai berikut :

a. Program/proyek bersamaan yang akan dibiayai oleh APBD Tingkat I.

b. Program/proyek yang karena besarnya-anggaranannya diusulkan kepada pemerintah pusat melalui jalur forum Nasional pembangunan dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk dibiayai APBN.

3. Peserta forum konsultasi regional pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Wakil-wakil Bappeda Tingkat I.

b. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I.

c. Wakil-Wakil Instansi Pemerintah Pusat, Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Departemen Teknis Tertentu.

d. Instansi/Lembaga lain yang dipandang perlu baik pusat maupun Daerah.

4. Waktu Penyelenggaraan Forum Konsultasi

Regional Pembangunan pada bulan Agustus/September.

5. Hasil Konsultasi Regional Pembangunan tersebut adalah :

a. Rencana usul proyek yang dibiayai oleh masing-masing Daerah Tingkat I yang berkepentingan.

b. Rencana usul proyek yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan konsultasi Nasional Pembangunan.

c. Rencana usul proyek/program yang diusulkan untuk dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan masing-masing Daerah yang berkepentingan.

d. Rencana usul program yang dibiayai oleh Swasta dan Perbankan.

Tahap Keenam : Tahap Konsultasi Nasional Pembangunan.

Peserta forum Konsultasi Nasional Pembangunan adalah : Wakil-wakil BAPPEDA Tingkat I Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Sekretariat Wilayah Daerah, Wakil-wakil Instansi Pemerintah Pusat : BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri, Departemen Teknis Tertentu, - Instansi/Lembaga lain yang dipandang perlu baik pusat maupun Daerah. Waktu penyelenggaraan Konsultasi Nasional Pembangunan di-

perkiraan pada bulan Oktober atau Nopember dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana usul program/proyek sebagai hasil kordinasi pembangunan yang di adakan di Daerah berdasarkan skala prioritas.
2. Masalah-masalah/hambatan yang di hadapi- Daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Rencana usul untuk bantuan pembangunan.

Demikian mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (Bottom up and top down planning) agar kiranya dapat dijelaskan sistem dan mekanisme perencanaan antar sektoral dan Daerah atau Daerah dalam siklus Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dan di bawah ini penulis menggambarkan dengan skema daripada proses atau mekanisme perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah sebagai berikut :

Dan di bawah ini penulis merumuskan secara umum hasil rumusan rapat kordinasi penyusunan dan penyusunan rencana program/proyek pembangunan TRIWULAN II Tahun 1988 / 1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sesuai dengan data yang ada pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru adalah sebagai berikut :

1. Hasil rumusan/proyek yang akan dibiayai oleh Bantuan Luar Negeri (LOAN) sebanyak 14 buah proyek dengan perkiraan dana sebesar Rp.3.009.205.700.- (tiga milyar sembilan juta dua ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
2. Hasil rumusan rencana program/proyek yang akan dibiayai oleh APBN (Sektoral) sebanyak 12 proyek dengan perkiraan dana sebesar Rp.173.608.000.- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Hasil rumusan rencana program/proyek yang akan dibiayai oleh INPRES sebanyak 346 buah proyek dengan perkiraan dana sebanyak Rp.1.323.695.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
4. Hasil rumusan rencana program/proyek yang akan dibiayai oleh APBD Tingkat I sebanyak 20 buah proyek dengan perkiraan dana sebanyak Rp.302.252.678.- (tiga ratus dua juta duaratus lima puluh dua enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
5. Hasil rumusan rencana program/proyek yang akan dibiayai oleh APBD Tingkat II sebanyak 38 buah proyek dengan perkiraan dana sebanyak Rp.363.800.000.-

## B. Pelaksanaan Kordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Pada sub bab ini yang membicarakan kordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu :

1. Kordinasi Secara Horisontal
2. Kordinasi Secara Vertikal.

### 1. Kordinasi Secara Horisontal

Pentingnya kordinasi secara horisontal dalam rangka menunjang terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan dalam hal ini kordinasi secara horisontal dalam rangka kordinasi penyusunan rencana pembangunan. Jadi dengan demikian Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang ada dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen-departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja dalam Wilayah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Sedangkan Dinas Daerah Tingkat II adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II yang mempunyai tugas " Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Desa ".

#### a. Instansi Vertikal

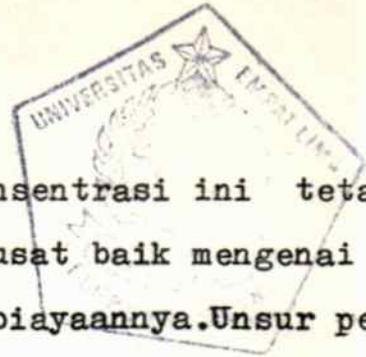
Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugasnya di-Daerah Tingkat II Barru, baik terhadap Pembangunan Pro-

yek Daerah maupun terhadap pembangunan proyek pusat dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaannya melakukan kordinasi dengan Bappeda Tingkat II, di bawah kordinasi Kepala Wilayah sebagai Pemerintah Pusat. Berhubungan dengan ini maka Instansi Vertikal wajib melakukan/melaporkan kegiatan dan rencana, memberikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Kepala Wilayah.

Bappeda Tingkat II adalah Badan/Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsinya melakukan kordinasi diantara Dinas-Dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lainnya yang berada dalam Wilayah Daerah. Untuk itu dalam melakukan kordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Bappeda Tingkat II Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan kordinasi dengan Instansi Vertikal yang ada di Daerah Tingkat II Baru yang berazaskan dengan tugas dekonsentrasi. Oleh karena itu tidak semua tugas-tugas pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut azas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah pusat di Daerah menurut azas dekonsentrasi.

Tugas yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepa



da pejabat daerah menurut azas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaannya adalah Instansi-instansi Vertikal yang dikordinasikan oleh Kepala Wilayah dalam kedudukannya sebagai perangkat pemerintah Pusat, tetapi kebijaksanaan-nya terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, oleh Bappeda Tingkat II Barru melakukan penyusunan rencana dengan kordinasi instansi-instansi Vertikal seperti dalam rapat kordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II dengan memperhatikan usul-usul program/proyek disertai analisa pendahuluan tentang kelayakan yang berisi sebagai berikut :

1. Jumlah modal yang dibutuhkan dan biaya operasi tiap tahun.
2. Hasil penilaian keuangan atas program/proyek bilamana dapat dinilai.
3. Lokasi yang paling sesuai untuk program/proyek dan alternatif cadangan lokasi lain.
4. Jenis dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan, baik tahap pembangunan maupun tahap waktu beroperasinya proyek.
5. Jenis teknologi yang optimal dan metode operasi yang diperlukan.

6. Asumsi-asumsi yang menandai pengkajian program / proyek yang dapat mempengaruhi keberhasilan kelancarannya.
7. Metode atau perincian kembali mengenai pembayaran biaya
8. Dukungan kerajasama antar lembaga-lembaga untuk pelaksanaan program/proyek.
9. Jenis dan ruang lingkup mamfaat program/proyek dan kelompok masyarakat yang memperoleh mamfaat.

Dalam penyusunan rencana atas kordinasi Bappeda Tingkat II dengan Instansi-instansi Vertikal mempersiapkan program/proyek, yaitu dengan merumuskan Garis-Garis Besar per masalah yang dihadapi dan hasil evaluasi/analisa sebagai hasil tahap pertama.

#### b. Dinas-Dinas Daerah

Dinas-dinas Daerah dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya berdasarkan pada azas desentralisasi, yaitu tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah, dalam rangka azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa s sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut kepentingan atau penentuan kebijaksanaan, perencanaan pelaksanaan maupun pembiayaannya. Demikian juga perangkat daerah sendiri dalam pelaksanaannya, terutama ~~daerah-dinas~~ Daerah.

Bappeda Tingkat II Barru dalam melaksanakan fungsinya didukung atas kordinasi atas dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun

maupun dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu Dinas Daerah, memberikan partisipasinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah ditetapkan, dinas-dinas daerah memasukkan data kepada kegiatan keuangan sebagai pengelola anggaran rutin dan kepada Bappeda Tingkat II sebagai pengelola anggaran pembangunan.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penyusunan rencana RAPBD sebagai kelengkapan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permintaan kepada Dinas-dinas Daerah tentang rencana pendapatan dan rencana belanja.
2. Dinas-dinas Daerah memasukkan rencana anggaran tersebut dalam bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) dan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA).
3. Penganalisaan atas Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) oleh kegiatan keuangan dan Daftar Usulan Kegiatan Proyek Daerah (DUPDA) oleh Bappeda Tingkat II.
4. DUPDA/DUKDA diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam pengelolaan data tersebut, oleh Bappeda Tingkat II bekerjasama dengan bagian keuangan, untuk Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin.

Bappeda Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru dalam menentukan kebijaksa-

naan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan pengusulan dari Dinas-dinas Daerah dan penilaian atas pelaksanaannya.

## **2. Kordinasi Secara Vertikal.**

Bappeda Tingkat II Barru dalam melaksanakan atau melakukan kordinasi secara vertikal dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, dalam hal ini pemerintah Kecamatan sebagai jalur dekonsentrasi terendah.

Bappeda Tingkat II adalah merupakan suatu badan dan merupakan unsur Staf Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru, sebagai unsur Staf tentunya dalam hal ini membantu Bupati Kepala Daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengawasi pelaksanaannya baik dalam pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Disamping itu juga membantu dalam menentukan kebijaksanaan dalam bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaiannya atas pelaksanaannya.

Pemerintah Kecamatan berkewajiban mengadakan intensifikasi penerimaan Daerah baik mengenai jumlah maupun kecepatan pemusukan ke Kas Daerah. Pemerintah Kecamatan wajib meningkatkan penerimaan dari hasil-hasil dinas-dinas Daerah dan Instansi Vertikal yang ada dalam Wilayah Binaannya

Bappeda Tingkat II selanjutnya mengelolah dan menetapkan perencanaannya. Dalam mempersiapkan rencana program pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, Bappeda Tingkat II senantiasa melakukan kordinasi dengan pemerintah Kecamatan dengan mengusahakan keterpaduan ren-

cana Nasional dan rencana Daerah.

Proses perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Baru dan pelaksanaannya oleh Bappeda Tingkat II selaku badan perencanaan melaksanakan fungsinya atas kordinasi dengan Instansi Vertikal, Dinas-dinas Daerah dan Pemerintah Kecamatan, baik pada proyek pembangunan yang pembiayaannya disediakan melalui anggaran pembangunan daerah, maupun proyek pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pemerintah pusat.

Menyangkut proyek-proyek pembangunan daerah, yang pembiayaannya pada anggaran pembangunan daerah, proses penyusunan rencananya adalah sebagai berikut :

- a. Pada mulanya rencana itu disusun oleh dinas-dinas daerah dan instansi vertikal dalam lingkungan Kecamatan, untuk kemudian diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui bagian pembangunan untuk kepentingan analisa dan penelitian dalam hubungan ini usul dan saran dari DPR mendapat pengertian sepenuhnya.
- b. Setelah di adakan perbaikan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Sekretaris Daerah untuk diteliti dengan penjelasan sepenuhnya dari Kepala Bagian Pembangunan. Setelah disetujui sekaligus dengan anggaran pembiayaannya maka rencana itu dikembalikan ke pada dinas dan instansi vertikal untuk pelaksanaannya.

### C. Partisipasi Instansi Vertikal dan Dinas Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Baru selaku Badan Perencana Pembangunan secara komprehensif yang mana mendapat dukungan dari Instansi Vertikal dan Dinas Daerah dalam rangka terselenggaranya proses perencanaan pembangunan.

Telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Baru berkewajiban menjalankan/menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal dan dinas daerah dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal ini bilamana instansi vertikal dan dinas daerah berkehendak melakukan kegiatan-kegiatan ia wajib melapor dan memberikan keterangan sesuai pelaksanaan tugasnya kepada Bappeda Tingkat II.

Dalam hal ini dalam rangka partisipasi instansi vertikal dan dinas daerah demi terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Baru, dari instansi vertikal dan dinas daerah yang penulis jadikan responden, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II, yang di-

hadiri oleh instansi vertikal dan dinas daerah yang mana dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru, rapat ini diharapkan menghasilkan rumusan proyek sebagai berikut:

1. Yang akan dibiayai oleh APBD Asli Dati II.
2. Yang akan dibiayai oleh APBD Asli Dati I.
3. Yang akan dibiayai oleh APBN lewat Sektoral Instansi Vertikal di Propensi Daerah Tingkat I.
4. Yang akan dibiayai sebagai proyek khusus (BAPPENAS) Bantuan Luar Negeri dan sebagainya.

Sebagai realisasi dari RAKORBANG Tingkat II yang dihadiri oleh instansi vertikal dan dinas daerah, yang diharapkan menghasilkan rumusan proyek, untuk itu di bawah ini penulis mengemukakan hasil rumusan yang dibiayai oleh RAKORBANG tersebut.

#### a. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II Barru dari hasil RAKORBANG Tingkat II, hasil rumusan yang dibiayai oleh Bantuan Luar Negeri (LOAN), Kabupaten Daerah Tingkat II Barru tahun anggaran 1988/1989, yaitu jenis proyek tersebut peningkatan SMTA ke Guruan Teknologi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, dengan Volume pekerjaan meliputi peningkatan bangunan yang memakan biaya dalam DIP ( 2000 ) yang dalam proses tender. Dan pengadaan bangunan SMTP Barru, yang meliputi rehabilitasi ruangan, biaya perencanaan pengelolaan proyek dan pengawasan biayanya dalam DIP 15.316.

#### b. Departemen Pertanian

Departemen Pertanian Dati II Barru dari hasil RAKOR-BANG Tingkat II tersebut meliputi rumusan yang dibiayai lewat Sektoral (APBN), yaitu pembinaan pendidikan dan latihan dan informal peternakan yang meliputi volume pekerjaan pendidikan latihan peternakan di Barru sebanyak 240 siswa.

#### c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Barru dari hasil rumusan tersebut meliputi proyek yang di biayai oleh APBD Kabupaten Dati II Barru Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu, proyek pengadaan dan penyebaran benih palawijah dan hortikultura.

#### d. Dinas Pekerjaan Umum

Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Dati II Barru dari rumusan tersebut meliputi proyek yang dibiayai oleh APBD Tingkat II Barru Tahun Anggaran 1988/1989, yaitu proyek rehabilitasi jembatan dan jalan yang meliputi :

1. Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.
2. Rehabilitasi jalan dan duiker yaitu poros Mangkoso Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja.

Denikian beberapa program/proyek pembangunan yang diusulkan daripada Instansi Vertikal dan Dinas Daerah dalam rangka partisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan di Daerah Tingkat II Barru.

## D. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

### 1. Pimpinan BAPPEDA

Dalam Administrasi Pemerintahan, kordinasi dimaksudkan untuk menyeragamkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan kelompok pejabat pelaksana suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinir berarti kegiatan para kelompok pelaksana menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam mencapai tujuan.

Telah disepakati dan disadari bersama bahwa pentingnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, namun pada kenyataannya dalam peraktek tidak jarang terdapat berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya kordinasi yang diperlukan, dengan demikian pencapaian sasaran atau tujuan yang diharapkan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.

#### a. Pimpinan Terhadap Bawahan

Sebagai dasar pembahasan ada baiknya kalau penulis mengemukakan pengertian kepemimpinan. Secara Ethimologis Pemimpin itu adalah seorang yang mengepalai atau tepatnya yang menjadi ketua dalam suatu organisasi atau unit organisasi.

Jadi dengan demikian Kepemimpinan adalah menyangkut tugas-tugas. Seorang pemimpin dalam organisasi bertugas memelihara dan memajukan organisasi untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru sebagai Badan/Staf perencana yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bar-

ru, sebagai upaya daripada pimpinan menggerakkan bawahannya, dalam hal ini Ketua Bappeda Tingkat II Barru dalam mencapai tujuan, yaitu ada dua cara yang ditempuh dalam rangka pembinaan, sebagai berikut :

a. Secara Eksternal

b. Secara Internal.

ad. a. Secara Eksternal

Sifat-sifat yang sebaiknya di miliki oleh seorang pemimpin yang hendak berhasil dalam tugasnya, tidaklah cukup bilamana tidak dibarengi dengan teknik-teknik kepemimpinan dengan mudah dapat menggerakkan bawahannya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru dalam rangka menggerakkan bawahannya, dalam hal ini Ketua Bappeda Tingkat II Barru selalu berupaya bagaimana meningkatkan hubungan kerjasama dalam lingkungan BAPPEDA itu sendiri, yaitu Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru setelah mengikuti rapat dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru, maka Ketua Bappeda memanggil para Kepala Bidang untuk diberikan pengarahan dari hasil rapat kemudian diteruskan kepada stafnya masing-masing.

Untuk jelasnya penulis menggambarkan dengan tabel bagaimana tanggapan responden tentang Pimpinan daripada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru, sebagai berikut :



TABEL VII  
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PIMPINAN  
BAPPEDA TK. II BARRU.

No.	Keterangan	F	Persentase
1.	Cukup baik	4	20
2.	Baik	11	55
3.	Sedang	5	25
4.	Kurang baik	-	-
5.	Tidak menjawab	-	-
Jumlah		20	100

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat di ketahui dari 20 responden yang penulis wawancarai sekitar masalah itu 4 orang dari responden tersebut menyatakan cukup baik, 11 orang menyatakan baik, 5 orang menyatakan sedang, dan kurang baik dan yang tidak menjawab tidak ada jawaban.

Dari hasil jawaban daripada responden yang penulis gunakan 11 orang yang menyatakan baik atau 55 % dari responden yang ada, yaitu para Kepala Bidang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru, Instansi terkait dan para Kepala Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, maka dapat dikatakan

bahwa hubungan dengan instansi-instansi tersebut berjalan dengan baik.

Sejalan dengan pendidikan yang semakin maju, maka orang semakin tinggi kecerdasannya, semakin banyak mereka menggunakan rasionya, berkaitan dengan itu usaha daripada Ketua Bappeda Tingkat II Barru dengan membina Stafnya dengan tujuan meningkatkan kualitasnya, dalam hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru, maka Bapak Ir Makkasau Sakaria selaku Bidang Fisik dan Prasarana telah di utus untuk mengikuti kursus perencanaan.

Untuk terselenggaranya suatu kordinasi perencanaan pembangunan yang berjalan baik harus ditunjang dengan pemimpin yang sanggup dalam bidang tersebut dalam hal ini Ketua Bappeda Tingkat II Barru. Jika ditinjau sepintas lalu pimpinan Ketua Bappeda Tingkat II Barru dari sejak terbentuknya, dimana organisasi ini dikategorikan masih baru, namun demikian penulis dapat menanggapi bahwa Teori Kepemimpinan yang berlaku pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru adalah Teori Pengangkatan bahwa seseorang yang menyebabkan menjadi pemimpin diangkat oleh atasannya. Pengangkatan seorang pemimpin menghendaki adanya syarat-syarat kepemimpinan, hal ini dapat dilihat adanya pergantian pejabat atau Ketua BAPPEDA yang berturut-turut sebanyak 4 orang, dimana ada yang diantaranya memangku jabatan yang cukup lama dan ada pula yang sangat singkat, untuk itu lebih jelasnya

sebagai berikut :

1. A. Abdullah Saibi yang menjabat pada tahun 1980-1983.
2. Drs. Mustam Lazim yang menjabat pada tahun 1983-1985.
3. Drs. Syarifuddin Sulaiman yang menjabat pada tahun 1985-1990.
4. Drs. A. Masyamin, MS yang menjabat Ketua Bappeda Tingkat II Barru mulai pada tanggal 26 Juli 1990 sampai sekarang.

Kalau diperhatikan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Bappeda Tingkat II Barru sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah adanya orang-orang yang memegang jabatan Ketua Bappeda, yang menandakan adanya pengangkatan Ketua Bappeda Tingkat II sesuai dengan surat keputusan atasannya. Terbukti bahwa selama Bappeda Tingkat II Barru terbentuk sudah 4 orang yang menjabat dan yang sekarang ini Alumni Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

#### ad. Secara Internal

Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi memegang peranan penting, untuk itu seorang pemimpin yang baik selalu mencurahkan perhatiannya kepada orang-orang yang dipimpinnya dengan segala kebutuhannya baik dengan material maupun dengan spritual sedemikian rupa sehingga mereka mengaku bahwa kemajuan organisasi a-

dalah kemajuannya sendiri, beserta keluarganya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian orang-orang yang dipimpin atau para personilnya dengan tulus ikhlas, jujur penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Atas dasar tersebut, Ketua Bappeda Tingkat II Barru selaku pimpinan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan, memelihara dan membina suasana kerjasama yang harmonis dengan rasa loyalitas yang dapat mempertinggi kegairahan para personilnya, dalam hal ini diadakan arisan setiap bulan dengan tujuan di samping saling membantu dalam soal keuangan juga dipergunakan sebagai tempat pertemuan dari hati kehati yang menyangkut kelancaran tugas-tugas dalam organisasi Bappeda Tingkat II Barru, maupun kepentingan pribadi masing-masing. Juga memperingati hari-hari Besar Islam seperti Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W dan Isra' Mi'raj.

#### b. Partisipasi Bawahan

Bappeda Tingkat II selaku Badan/Staf yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal ini Bappeda Tingkat II Barru di bantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penjelasan mengenai Partisipasi Bawahan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat II Barru yang penulis uraikan pada bab yang terdahulu, dan untuk memberikan gambaran ten

tang bagaimana partisipasi responden dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Barru, - maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VIII

KETERLIBATAN RESPONDEN DALAM MENUNJANG PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DATI II BARRU.

! No. !	K e t e r a n g a n !	F !	Persentase !
! 1. !	Karena tugas !	3 !	15 !
! 2. !	Menyangkut kepentingan umum !	8 !	40 !
! 3. !	Lokasi pembangunan di Desa !	! !	! !
! !	Kami !	- !	- !
! 4. !	Pembangunan menyangkut kita !	! !	! !
! !	semua !	9 !	45 !
! 5. !	Tidak menjawab !	- !	- !
! !	j u m l a h !	20 !	100 !

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.

Berdasarkan daripada tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang penulis wawancara sekitar masalah ini yaitu 3 orang dari responden tersebut mengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam rangka menunjang terselenggaranya perencanaan pembangunan yang berdasarkan karena tugas, 8 orang yang menyatakan menyangkut kepentingan umum atau 40 % dari responden yang ada, 9 orang

yang menyatakan bahwa keterlibatan mereka karena perencanaan pembangunan itu menyangkut kita semua atau 45 % dari responden yang ada.

## 2. Kemampuan Personil dari Bappeda

Dalam melaksanakan pembangunan perlu diwujudkan keserasian dan kordinasi dari berbagai kegiatan pembangunan disetiap daerah untuk mencapai dayaguna dan hasil guna.

Sebagaimana dikemukakan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen yaitu proses perencanaan, cara-cara yang rasionil dalam pencapaian tujuan berdasarkan perhitungan-perhitungan dalam pemilihan alternatif terbaik menurut sumber daya akan dicapai.

Proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, itulah yang dikatakan perencanaan dengan kata lain proses pemikiran mengenai sasaran, pengalokasian dana dan biaya serta pengorganisasiannya, penentuan tempat dan waktu dan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Untuk menyusun suatu perencanaan yang baik, yang realistis rasionil dan menyeluruh baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah dibutuhkan kemampuan, keahlian dan kecakapan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan pengalaman yang pernah dialami dan keberhasilan dari perencanaan, kuncinya terletak pada manusianya atau personil-personil yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Agar Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berhasil

secara berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan personil-personil yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai masalah pembangunan dan perencanaan di bidang pembangunan Daerah.

Untuk berbagai sektor pembangunan seperti tenaga perencanaan dimana tenaga staf pembantu ketua diperlukan oleh personil-personil yang mempunyai keahlian khusus yang kreatif, terampil dan memiliki daya dalam pengolahan data penganalisaan, survei dan pengawasan macam-macam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru mempunyai tenaga staf yaitu BAPPEDA Tingkat II Barru yang bertugas dalam bidang perumusan kebijaksanaan dibidang pembangunan serta mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Daerah membutuhkan personil-personil dalam jumlah dan kualitas yang cukup mampu dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk jelasnya penulis dibawah ini menggambarkan secara terperinci personil BAPPEDA Tingkat II Barru, menurut tingkat pendidikannya (sarjana) sebagai berikut :

TABEL IX  
PERSONIL BAPPEDA DIPERINCI MENURUT  
TINGKAT PENDIDIKAN (SARJANA)

No.	! N a m a	! J a b a t a n	! Pendidikan
1.	! Drs. A. Masyamin, MS	! Ketua Bappeda	! Sarjana Sos - ! pol Unhas
2.	! Drs. Husain Hamsa	! Kabid Pendata- ! an dan Laporan	! Sarjana Sos - ! pol Unhas
3.	! Ir. Iskandar Hamid	! Kabid Ekonomi ! dan Sosbud	! Sarjana Peter ! nakan Unhas
4.	! Drs. Muhammad Arsyad	! Sie. Pengum- ! pulan Data	! Sarjana Unhas
5.	! Ir. Makkasau Sakaria	! Kabid Fisik ! dan Prasarana	! Sarjana Unhas
6.	! Ir. Abdul Samad	! Sie. Pertanian	! Sarjana Unhas
7.	! Zulfikar, S.H	! Sie. Kesehja- ! teraan	! Sarjana Unhas
8.	! Drs. Mustafa Ismail	! Sie. Pengairan	! STILAN

Sumber : Kantor Bappeda Tingkat II Barru tahun 1990

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa personil-personil/tenaga-tenaga perencana daripada Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Tingkat II Barru adanya indikator bahwa personil-personil tersebut menurut hemat penulis adalah masih baru dalam memangku jabatan pada Kantor Bappeda Dati

II Barru, dan walaupun bila ditinjau dari segi pendidikannya sudah cukup, namun pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru sebagai Badan/Staf yang bertugas dalam Bidang Perumusan Kebijakan Pembangunan membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil dalam bidang itu. Namun pada Kantor BAPPEDA Dati II yang ada dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan belum memadai bila dibandingkan dengan tugas-tugas yang tersedia khususnya dalam Bidang Pengolahan Data, karena personil - personil yang ada pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru belum semuanya mengikuti kursus perencanaan sebagaimana mestinya.

Untuk tabel berikut penulis menggambarkan personil - personil/tenaga dari Bappeda Tingkat II Barru, dilihat dari tingkat pendidikannya (Sarjana Muda) sebagai berikut :

TABEL X  
PERSONIL BAPPEDA DI PERINCI MENURUT  
TINGKAT PENDIDIKANNYA (SARJANA MUDA).

No.!	N a m a	! J a b a t a n !	Pendidikan
1. !	H. Muhammad Ali H. BA	! Sek. Bappeda	! Sarjana Muda A P D N
2. !	Abdul Salam Said, BA	! URS. Umum	! Sarjana Muda
3. !	Kaharuddin Bsc	! Sie. Pelaporan!	Sarjana Muda

Sumber : Kantor Bappeda Tingkat II Barru tahun 1990.

Dengan melihat data-data yang ada pada tabel tersebut

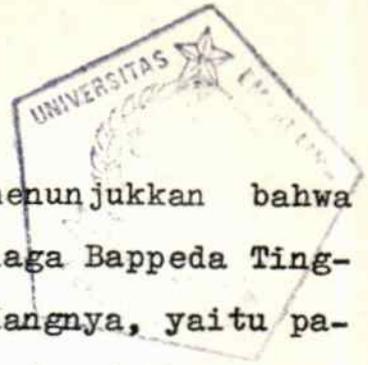
di atas menunjukkan bahwa tenaga-tenaga personil Badan Perencanaan Pembangunan Dati II Barru adanya personil tersebut di atas yang berjumlah 3 orang yang ditempatkan pada suatu jabatan yang tidak sesuai dengan bidangnya, karena rata-rata pegawai personil tersebut di atas memangku dua jabatan yang kemudian tidak disertainya dengan keterampilan khusus dalam bidang Perencanaan Pembangunan, dengan demikian menurut hemat penulis hal ini dapat menimbulkan tunggang tindihnya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menurut penulis tidak ada relevansinya.

Sedangkan pada tabel berikut ini penulis menggambarkan personil tenaga daripada BAPPEDA Tingkat II Barru menurut tingkat Pendidikannya (SLA), tenaga-tenaga ini sebagai salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kegiatan perencanaan Pembangunan pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru adapun data-data tersebut sebagai berikut :

TABEL XI  
PERSONIL BAPPEDA DIPERINCI MENURUT  
TINGKAT PENDIDIKANNYA (SLA/SD)

No. !	N a m a	J a b a t a n	Pendidikan
1. !	S. Bakri	! SiE. Kop. & Pem. Prod.	! S M A
2. !	Usman Tahir	! SiE. Perhub. & Telkom	! S D N
3. !	A. Dalauleng	! Kasi Keuangan	! S M A
4. !	Nursiah	! Staf	! S M A
5. !	S a k k a	! Staf	! S M A
6. !	Mardatillah	! Staf	! SMEA

Sumber : Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru Tahun 1988.



Bertitik tolak dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih nampak dari penempatan personil/tenaga Bappeda Tingkat II Barru yang tidak sesuai dengan bidangnya, yaitu pada tabel di atas nampak seksi perhubungan dan telkom, dimana yang menjabat seksi tersebut adalah alumni SD.

Dari tabel yang penulis paparkan terdahulu bila dilihat dari segi kemampuan, kualitas yang belum memadai dari segi Perencanaan Pembangunan, karena belum semuanya mendapat kursus atau latihan Perencanaan Pembangunan. Kemudian penempatan personil yang tidak sesuai, dapat pula mengakibatkan pengaruh psikologis dalam menjalankan tugas, misalnya dalam melakukan kordinasi dengan Dinas Daerah, Instansi Vertikal yang biasanya pangkatnya lebih tinggi akhirnya kordinasi yang dilakukan banyak bersifat pengumpulan data saja.

Baik dari segi managerial skill maupun tehcnical skill yang belum memadai dan merupakan keterbatasan maupun personil Bappeda Tingkat II Barru mengakibatkan kurangnya ketetapan Bappeda dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing terutama dalam hal kordinasi, kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah antar Dinas Daerah, Instansi Vertikal dan Badan-badan lainnya.

Kemampuan Personil yang terbatas dapat memberi pengaruh yang dicapai oleh organisasi, karena Bappeda Tingkat II Barru mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan Daerah dan penilaian atas pelaksanaannya, meng-

haruskan adanya tenaga personil atau perencanaan yang berkemampuan tinggi dalam kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perencanaan pembangunan dapat berhasil memenuhi keinginan dan harapan seluruh masyarakat Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang merupakan tujuan Pembangunan Nasional.

Kemudian daripada itu dengan dilaksanakannya PERDA No. 05 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat II Barru dimana untuk pengisian jabatan jabatan Kepala Bidang telah terpenuhi walaupun golongan pangkat belum terpenuhi akan tetapi untuk tenaga pelaksana operasionalnya masih kurang.

Dengan melihat fungsi jabatan secara fungsional yang ada pada lingkungan BAPPEDA Tingkat II Barru yang lowong ini akan mempengaruhi kegiatan/aktivitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### - Sarana Pasilitas

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat-II Barru ditunjang oleh beberapa sarana pasilitas, dalam lingkungan Bappeda Tingkat II Barru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang baik menghendaki penyediaan sarana yang memadai, misalnya kantor, alat-alat kantor, kendaraan dan sebagainya. Setidak-tidaknya harus tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan sesuai dengan luas dan besarnya yang harus dilakukan -

untuk mencapai tujuan.

Pembangunan Daerah Tingkat II Barru tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan sarana-sarana yang di maksudkan, apalagi dengan semakin kompleksnya tugas dari BAPPEDA Tingkat II Barru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini berarti bahwa semakin bertambah pula kebutuhan akan sarana-sarana tersebut, sehingga setiap tahun diadakan penambahan sarana material, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan/kegairahan kerja personil Bappeda Tingkat II Barru secara keseluruhan.

Menurut hemat penulis penyediaan akan sarana-sarana ada pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru dalam kondisi yang baik dalam perencanaan dan pemamfaatannya.

Untuk jelasnya di bawah ini penulis menggambarkan bagaimana tanggapan responden tentang keadaan sarana dalam menunjang fungsi Bappeda Tingkat II Barru sebagai berikut:

TABEL XII  
TANGGAPAN PERSONIL TENTANG KEADAAN SARANA  
DALAM MENUNJANG FUNGSI BAPPEDA

No. !	K e t e r a n g a n !	E !	P e r s e n t a s e
1. !	Cukup lengkap	! 7 !	35
2. !	L e n g k a p	! 9 !	45
3. !	Kurang lengkap	! 4 !	20
4. !	Tidak lengkap	! - !	-
5. !	Tidak menjawab	! - !	-
J u m l a h		! 20 !	100

Sumber : Hasil wawancara dengan responden

### 3. Sikap dari Instansi Vertikal dan Dinas Daerah terhadap Kordinasi.

Bahwa Pembangunan dilaksanakan di Daerah Tingkat II Barru mencakup berbagai sektor, dalam hal ini Bappeda Tingkat II sebagai Badan Perencana secara konprehensive, Namun demikian pelaksanaan proyek pembangunan yang betul - betul dapat dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat karena partisipasi dan sikap dari instansi vertikal dan dinas Daerah yang ada dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru terhadap kordinasi.

#### a. Hubungan Kerja Bappeda Tingkat II dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah.

BAPPEDA Tingkat II Barru yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sebagaimana kita ketahui bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin jalannya pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Namun demikian salah satu fungsi Bappeda Tingkat II dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 sebagai dasar pembentukan Bappeda Tingkat II adalah melaksanakan kordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan-badan lainnya yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II.

Bertitik tolak dari fungsi Bappeda sebagaimana yang telah ditetapkan di atas maka hubungan kerja sama antar Bappeda Tingkat II dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah dalam Bidang Perencanaan Pembangunan adalah hubungan kerja yang sifatnya koordinatif.

Setiap Perencanaan disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Instansi Vertikal senantiasa dikordinasikan oleh Bappeda Tingkat II dan diarahkan kepada REPELITA Daerah yang ditetapkan dan disesuaikan kemampuan Daerah, serta di arahkan pula untuk menunjang pembangunan sektoral yang berlangsung di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kebijaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Baru tentunya berorientasi-kepada kepentingan penduduk Dati II Baru yang di kaitkan-dengan Kebijakanaksanaan Pembangunan Nasional yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Baru, pemilihan sektor-sektor program/proyek yang konsisten terpadu dan terarah saling menunjang antar sektoral dan daerah dengan tujuan agar program pembangunan tersebut benar-benar dapat mencapai sasaran dalam hubungannya dengan permasalahan yang ada di-Daerah.

Untuk jelasnya di bawah ini dapat dilihat tanggapan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi Bappeda Tingkat II Baru sebagai berikut :

TABEL XIII  
TANGGAPAN INSTANSI TERKAIT TERHADAP  
PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA

No. !	K e t e r a n g a n !	F !	Persentase !
! 1. !	! Sangat berhasil !	! 11 !	! 55 !
! 2. !	! Berhasil !	! 5 !	! 25 !
! 3. !	! Kurang berhasil !	! 4 !	! 20 !
! 4. !	! Tidak berhasil !	! - !	! - !
! 5. !	! Tidak menjawab !	! - !	! - !
! !	! J u m l a h !	! 20 !	! 100 !

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru dalam melaksanakan kordinasi diantara instansi vertikal dan Dinas daerah yang ada di Daerah Tingkat II Barru telah melaksanakan fungsinya dengan baik, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh komposisi program yang dapat bermamfaat bagi Pembangunan di Daerah Tingkat II Barru.

#### B. Peranan dalam Monitoring dan Pengawasan

Salah satu aspek dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan yang penting sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau persoalan akan dapat diketahui sampai sejauh mana penyimpangan tersebut dibanding perkiraan semula. Lebih penting dari itu adalah untuk mengetahui apa sebabnya sehingga terjadi penyimpangan, yang selanjutnya akan di ambil kebijaksanaan korektif.

Pada dasarnya Bappeda Tingkat II Barru tidak mempunyai fungsi melakukan fungsi pengawasan pembangunan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan Bappeda Tingkat II Barru adalah Monitoring. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum bahwa Bappeda Tidak mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan, akan tetapi dengan mengadakan monitoring pelaksanaan pembangunan, maka dapatlah dikatakan bahwa Bappeda telah melaksanakan pengawasan pembangunan di Daerah,

Apabila melihat pelaksanaan pengawasan yang ditempuh Bappeda Tingkat II Barru yaitu Pengawasan Preventif dan pengawasan Refresif, dengan demikian pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru telah melakukan pengawasan refresif artinya pengawasan yang dilakukan setelah adanya pekerjaan.

Maksud daripada pengawasan refresif ini adalah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasil ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lebih lanjut di jelaskan oleh Bappeda Tingkat II Barru bahwa pengawasan refre-

sif ini menggunakan komperatif, yaitu :

- a. Mempelajari laporan-laporan kemajuan dari pelaksanaan pekerjaan di bandingkan dengan jadwal.
- b. Mengadakan analisa terhadap perbedaan tersebut termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- c. Membandingkan hasil laporan pekerjaan dengan rencana yang sudah diputuskan.
- d. Memberikan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk para penanggung jawab.
- e. Mengambil keputusan atas usaha perbaikan dan penyempurnaan.

Sedang ukuran-ukuran dalam monitoring/mengawasi suatu kemajuan program/proyek pembangunan ditentukan oleh ukuran-ukuran yang dipakai dalam penyusunan program pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pengawasan, dimana laporan ini tercantum secara garis besar tentang :

1. Inventarisasi Potensi Wilayah
2. Permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligus cara pemecahannya.
3. Proyek yang akan dibiayai oleh APBD Tingkat I.
4. Proyek yang akan dibiayai oleh APBD Asli Dati II.
5. Proyek yang akan dibiayai oleh Bantuan Pembangunan seperti Bantuan Presiden dan lain-lain.

Penyajian hasil laporan-laporan tersebut dapat pula dijadikan sebagai suatu kebijaksanaan dalam menentukan suatu keputusan, sehingga dengan penentuan perencanaan pemba-

ngunan lewat kegiatan monitoring dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan instansi vertikal dan dinas daerah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang harus diperhatikan oleh Bappeda Tingkat II Barru sebagai berikut :

TABEL XIV  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN  
MONITORING DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

No. !	K e t e r a n g a n
1. !	Keterbatasan berupa tenaga, waktu dan biaya dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara kontinue pada lokasi proyek pembangunan.
2. !	Pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara teknis pada proyek masih terbatas.
3. !	Faktor lainnya adalah masalah komunikasi.

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.

Yang dimaksud dengan komunikasi disini adalah bagaimana informasi yang disampaikan Bappeda kepada instansi vertikal atau dinas daerah dapat diterima dengan cepat atau

sebaliknya. Jadi yang dimaksud disini adalah komunikasi dua arah harus berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang peranan Bappeda Tingkat II Barru dalam memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, maka hasil wawancara tersebut semuanya menjelaskan bahwa Bappeda Dti II Barru, masih kekurangan tenaga dalam melaksanakan kegiatan memonitoring dan pengawasan pembangunan.

Namun demikian sebagai responden lainnya seperti dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa pelaksanaan monitoring dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Dati II Barru berjalan dan terselenggara dengan baik, meskipun sedikit mengalami hambatan sebagai akibat dari kurangnya tenaga ahli dalam menyusun laporan pelaksanaan program/proyek pembangunan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XV

TANGGAPAN INSTANSI TERKAIT TERHADAP PERANAN BAPPEDA DALAM MONITOR DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

! No. !	K e t e r a n g a n	! F !	Persentase	!
! 1. !	Cukup baik	! 5 !	25	!
! 2. !	B a i k	! 4 !	20	!
! 3. !	S e d a n g	! 7 !	35	!
! 4. !	Kurang baik	! 4 !	20	!
! 5. !	Tidak menjawab	! - !	-	!
!	J u m l a h	! 20 !	100	!

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN



## A. Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka berikut ini penulis mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan Koordinasi yang dijalankan oleh BAPPEDA Tingkat II Barru, baik secara horisontal maupun secara vertikal umumnya sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan adanya hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran hubungan Koordinasi tersebut, misalnya kurangnya hubungan komunikasi antar BAPPEDA Tingkat II dengan Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Badan-Badan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pemantapan komunikasi (hubungan kerja) perencanaan program atau proyek yang baik, misalnya pemantapan konsultasi perencanaan di Daerah maupun konsultasi perencanaan pembangunan yang sifatnya Regional dan Nasional.
2. Keberhasilan pelaksanaan tugas BAPPEDA Tingkat II Barru dalam Koordinasi perencanaan pembangunan pada umumnya ditunjang oleh adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan adanya dukungan dari Instansi Vertikal dan Dinas Daerah serta tersedianya segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.
3. Dengan semakin meningkatnya beban tugas yang harus di-

laksanakan oleh BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah maka perlu adanya dukungan dari personil-personil pelaksana yang mampu dan terampil. Melihat keadaan tenaga/personil yang ada di BAPPEDA Tingkat II Barru jika ditinjau dari segi kuantitasnya belum dapat memberikan prospek masa depan yang cerah. Hal ini diakibatkan adanya dobol pekerjaan yang ditangani oleh satu orang tenaga/personil. Dengan demikian di pandang perlu adanya peningkatan tenaga/personil yang terampil dan berpengalaman pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru demi kelancaran tugas-tugas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

#### B. Saran-saran

Dari uraian dan kesimpulan serta mempertimbangkan berbagai kenyataan yang terdapat dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan BAPPEDA Tingkat II Barru, maka di bawah ini disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tenaga-tenaga perencana yang baik dari segi kualitatif, maka disarankan perlunya peningkatan upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan latihan perencanaan pembangunan, khususnya bagi tenaga fungsional BAPPEDA melalui kursus-kursus, latihan sambil bekerja. Disamping itu perlu dipikirkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah tenaga-tenaga perencana yang benar-benar mempunyai latar belakang pengetahuan di bidang perencanaan.

2. Dalam kaitannya dengan perencanaan program/proyek pembangunan daerah oleh Instansi Vertikal dan Dinas Daerah sebagai sumber data perencanaan kiranya memberikan data atau informasi yang betul-betul mendesak untuk dikerjakan agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau tidak hanya menjadi bahan dokumen yang terealisasi karena beberapa faktor.
3. Dalam hubungannya dengan struktur organisasi BAPPEDA TK. II Barru, bahwa kiranya Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru patut memperhatikan dalam penempatan personil-personil dalam jabatan tertentu sesuai dengan keahlian dan kecakapan seseorang sehingga mampu menciptakan Team Work (jaring-jaring pekerjaan) - yang berdaya guna dan berhasil guna serta mempunyai kreatifitas didalam melaksanakan tugasnya. Karena dengan adanya tim ahli yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Ketua BAPPEDA Tingkat II Barru sehingga diharapkan pengaruh-pengaruh negatif dapat dihindarkan.
4. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Daerah, kiranya oleh pihak pemerintah daerah hendaknya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh kontraktor yang bonafide, berpengalaman dan memiliki keahlian dan perlengkapannya memadai, agar tidak hanya asal kerja. Sebaliknya bagi pemerintah daerah kiranya sering melakukan penilaian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU TEKS

Handayaniingrat, Soewarno. 1985. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung.

Hasibuan, Melayu, S.P, 1986. Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta : Gunung Agung.

Pamudji, 1982. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara.

Salim, Emil. 1983. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Jakarta : Yayasan Idayu.

Sarwoto, Nopember. 1985. Dasar-Dasar Organisasi dan Managemen, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang, P. MPA, PhD. 1979. Peranan Staf dalam Managemen, Jakarta : Gunung Agung.

\_\_\_\_\_, Filsafat Administrasi, 1981. Jakarta : Gunung Agung.

\_\_\_\_\_, Administrasi Pembangunan, 1981. Jakarta : Gunung Agung.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung.

Westra, Pariata. 1982. Ensiklopedi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung.

B. Metode Penelitian

Singarimbun, Masri. 1982. Metode Penelitian Survai. Jakarta: Gramade.

Ali, Faried dan Mastam Ladeng. 1989. Beberapa Informasi Tentang Metode Penelitian Administrasi. Ujung Pandang: Universitas "45".

C. Dokumen-Dokumen dan Lain-Lain

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata-Kerja BAPPEDA Tingkat II.

\_\_\_\_\_, Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah, (P5D), Lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982.

Undang-Undang Dasar 1945, P4, GBHN, (TAP. MPR NO. II/MPR/1983) Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

\_\_\_\_\_, Perda Kabupaten Dati II Barru Nomor 04 Tahun 1982, Tentang Susunan Organisasi dan Tata-Kerja BAPPEDA Tingkat II Barru.

AD Sadly, H, MPA. 1989. Catatan Kuliah Teori Kepemimpinan, Ujung Pandang: Universitas "45".

KEP. MENAGRI NO. 185 TAHUN 1980.  
PERDA NO. 04 TAHUN 1982.

K E T U A  
Drs. A. Masyamin, MS.

SEKRETARIAT  
H. Muh. Ali Habe, BA.

URS. PENYUSUNSN  
RENCANA PROYEK  
.....  
URS. KEUANGAN.  
.....  
URS. UMUM  
Abd. Salam Said, B

BIDANG  
PENDATAAN DAN LAPORAN  
Drs. Husain Hamzah

SEKSI  
PENGUMPULAN DATA  
Drs. Muh. Arsyad

SEKSI  
ANALISA DAN PENILAIAN  
.....

SEKSI  
P E L A P O R A N  
Drs. Kaharuddin.

SEKSI  
STATISTIK & DOKUMENTA-  
SI  
.....

BIDANG  
EKONOMI DAN SOS. BUDAYA  
Ir. Iskandar Hamid

SEKSI  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Zulfakar, S.H.

SEKSI  
P E E R T A N I A N  
Ir. Abd. Samad.

SEKSI  
KOPERASI & PEM. PRODUKSI  
S. B a k r i

SEKSI  
INDUSTRI DAN JASA  
.....

BIDANG  
FISIK DAN PRASARANA  
Ir. Makkasau Sakaria.

SEKSI  
P E N G A I R A N  
Drs. Mustapa Ismail.

SEKSI  
PERHUBUNGAN & TELKOM  
Usman Tahir

SEKSI  
T. T. RUANG & T. T. G. TANAH  
.....

SEKSI  
SUMBER ALAM DAN LING-  
KUNGAN HIDUP.  
.....

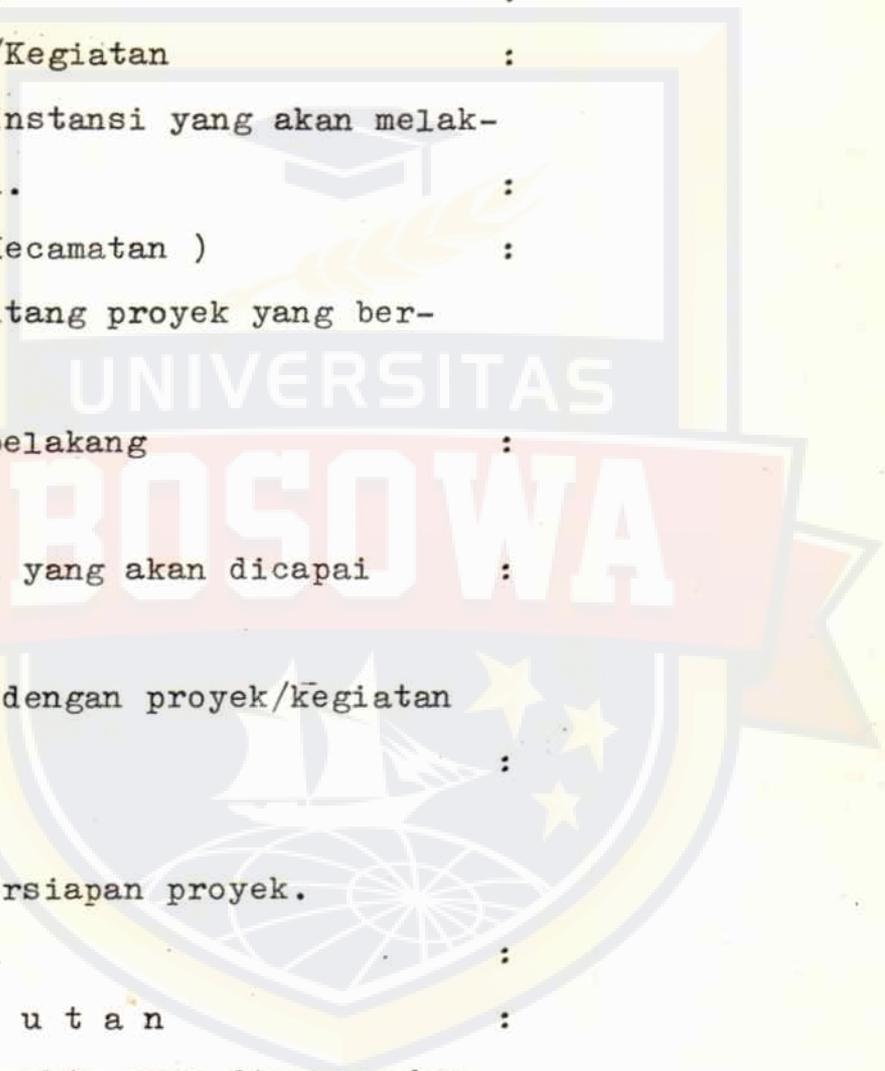


USULAN PROYEK KEGIATAN 1989/1990

Kabupaten/Daerah Tingkat II : B A R R U  
 Propensi/Daerah Tingkat I : SULAWESI SELATAN

---

1. Nomor Urut :
2. a. Proyek/Kegiatan :
- b. Dinas/Instansi yang akan melaksanakan. :
3. Lokasi ( Kecamatan ) :
4. Uraian tentang proyek yang bersangkutan.
  - a. Latar belakang :
  - b. Sasaran yang akan dicapai :
  - c. Kaitan dengan proyek/kegiatan lain. :
5. Tingkat persiapan proyek.
  - a. B a r u :
  - b. L a n j u t a n :
6. Perkiraan waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan/penyelesaian proyek/kegiatan :
7. Perkiraan biaya (Jutaan Rupiah).
  - a. Tahun 1989/1990 : Rp.
  - b. Seluruh Biaya sampai proyek



selesai.

: Rp.

Barru, ..... 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BARRU



UNIVERSITAS

---

Penilaian BAPPEDA Tingkat I dan Dinas/Instansi Vertikal  
yang bersangkutan.

Ujung Pandang, .....1989.

Kepala Dinas/Instansi Vertikal

BAPPEDA TK. I

---

REKAPITULASI USULAN PROYEK.....Tahun 1989/1990.

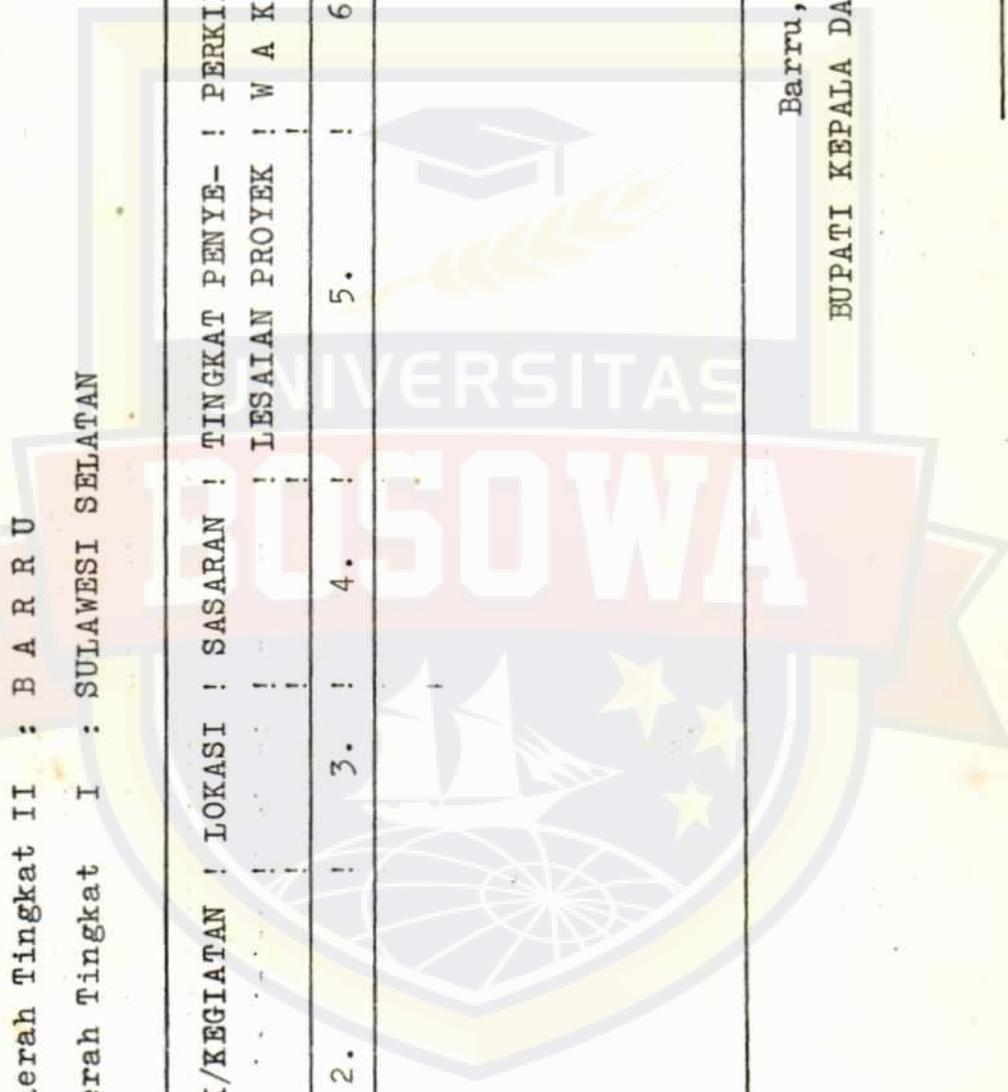
Kabupaten/Daerah Tingkat II : B A R R U

Propinsi/Daerah Tingkat I : SULAWESI SELATAN

NO. !	PROYEK/KEGIATAN !	LOKASI !	SASARAN !	TINGKAT PENYE- !	PERKIRAAN !	PERKIRAAN !
!	!	!	!	LESALIAN PROYEK !	W A K T U !	B I A Y A !
!	!	!	!	!	!	! (JUTAAN RP) !
1. !	2. !	3. !	4. !	5. !	6. !	7. !
						8. !

Barru, .....1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BARRU



## LAMPIRAN

DAFTAR KWISTIONER

Nomor urut responden : .....

Nama responden : .....

Alamat responden : .....

Penelitian ini diadakan dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang angkatan pertama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang **KORDINASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU.**

Pelaksana Penelitian :

- N a m a : R a m l i.
- Stb/NIRM : 45 86 020 393/87 11 33 420.
- F a k u l t a s : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- J u r u s a n : Administrasi Negara.

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 ".

Teknik yang digunakan : Observasi (pengamatan), dan Interview (wawancara).

Pertanyaan yang diajukan :

1. Apakah fungsi kordinasi yang dijalankan Bappeda Tingkat II Barru terhadap Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan



Kecamatan sudah sesuai dengan Kepres No. 27 Tahun 1980 yang dituangkan dalam Perda No. 04 Tahun 1982 ?

2. Apa yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan **kordinasi** perencanaan Pembangunan pada Kantor Bappeda ?
3. Sampai sejauh mana peranan Pemerintah dalam penyusunan - perencanaan pembangunan serta bagaimana keterlibatan masyarakat bawahan dalam penyusunan perencanaan tersebut ?
4. Apakah hubungan Bappeda Tingkat II Barru dengan instansi vertikal lainnya telah menunjukkan **kordinasi** yang baik seperti yang diharapkan ?
5. Data-data apa saja yang diperlukan dalam penyusunan rancangan RAPBN ?
6. Bagaimana keadaan Geografis dan Demografis Kabupaten Dati II Barru ?
7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan monitoring dan pengawasan pembangunan ?
8. Bagaimana struktur organisasi Bappeda Tingkat II Barru ?
9. Bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ?

Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang kami perlukan dari bapak. Atas perhatian dan bantuan bapak yang telah ber-susah payah menjawab dan mengisi daftar kwestioner ini seba-gaimana mestinya, kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah S.W.T. berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan bapak tersebut.

A M I N .